

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini memuat kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kajian teoritis untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti mengawali dengan mempelajari studi tentang tema yang telah dilakukan sebelumnya, teori dan konsep administrasi publik, paradigma administrasi publik, kebijakan publik, implementasi *green economy*, pembangunan pariwisata berkelanjutan dan desa wisata. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan dengan substansi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Sedangkan konsep dan teori tentang topik penelitian ini diperlukan untuk menganalisis penerapan *green economy* di Desa Ekowisata Pancoh, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman untuk mewujudkan desa wisata berkelanjutan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *green economy* maupun desa wisata berkelanjutan telah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Rangkuman hasil penelitian terdahulu yang dihimpun berdasarkan penelusuran pustaka sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
a.	<i>Green Economy</i> pada Pariwisata		
1.	(A. M. Sari et al., 2012)—Penerapan Konsep <i>Green Economy</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun	Mendesripsikan dan menganalisis penerapan konsep <i>green economy</i> dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, serta faktor pendukung dan penghambatnya.	Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya diterapkan sesuai prinsip-prinsipnya. Faktor penghambatnya terarah pada fasilitas yang kurang lengkap, sumber daya manusia, penurunan kualitas dan kuantitas apel, kecurangan travel, dan promosi.

	Kungkuk, Desa Punten Kota Batu).		
2.	(Alexandra et al., 2012) — <i>Towards a Green Economy Decision Support System for Tourism Destinations</i> (Menuju Sistem Pendukung Keputusan Green Economy untuk Destinasi Pariwisata).	Mengidentifikasi kebutuhan sistem pendukung keputusan (DSS) di destinasi wisata.	DSS dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkannya pada studi kasus destinasi baru untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam situasi perubahan.
3.	(Triyanti & Susilowati, 2018)—Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Menuju <i>Green Economy</i> Di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.	Mengevaluasi karakteristik pendayagunaan wilayah pesisir. Melakukan analisis nilai pendapatan wilayah pesisir, dan membuat rencana penataan wilayah berorientasi pada <i>green economy</i>	Strategi tata kelola wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul menyesuaikan dengan prinsip <i>green economy</i> dan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> dengan mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata. Pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaannya.
4.	(Hidayattuloh et al., 2020) — <i>The Green Economy Concept as Development Strategy of Cempaka Tourism Village toward Sustainable Tourism Development</i> (Konsep <i>Green economy</i> Sebagai Strategi Pengembangan Desa Wisata Cempaka Menuju Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan).	Melakukan kajian potensi serta daya tarik Desa Wisata Cempaka berdasarkan konsep <i>green economy</i> .	Pasar Slumpring adalah bagian penting dan prioritas dari pembangunan Desa Wisata Cempaka.
5.	(Asrudi & Puspa, 2021)—Penerapan Konsep <i>Green Economy</i> Di Objek Taman Nasional Wasur.	Mengetahui penerapan konsep <i>green economy</i> di objek wisata Taman Nasional Wasur.	Penerapan prinsip ekonomi hijau sudah dilakukan pada prinsip keadilan yang berguna bagi generasi berikutnya serta pengelolaan objek wisata alam tanpa merusak lingkungan.

6.	(Noviarita et al., 2021)—Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep <i>Green Economy</i> Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata Di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat).	Mengetahui pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat dan konsep <i>green economy</i> dan mengetahui dampak pandemi Covid-19 pada pendapatan masyarakat.	Penerapan konsep <i>green economy</i> belum optimal pada pengelolaan desa wisata. Pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang substansial pada pengelola desa wisata.
7.	(Pujiyati, 2022)—Penerapan Pilar <i>Green Economy</i> Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Ngringinrejo Bojonegoro.	Pengkajian terkait proses penerapan <i>green economy</i>	Agrowisata Kebun Belimbing Ngringinrejo memberikan pengaruh positif pada kenaikan ekonomi. Dari aspek sosial, pengembangannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja.
8.	(Mubarok, 2023)—Pengelolaan Desa Wisata Dengan penerapan Pilar <i>Green Economy</i> sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Studi Desa Japan Kec Dawe Kab Kudus).	Memperjelas serta mengkaji pengelolaan desa wisata Japan yang berbasis <i>green economy</i> terhadap peningkatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat.	Pengelolaan desa wisata belum sepenuhnya maksimal terkait pengelolaan sampah dan regulasi pemerintah desa. Penerapan pilar <i>green economy</i> berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa Japan yang dibuktikan dengan terciptanya lapangan pekerjaan serta kenaikan pemasukan. Di sisi sosial, masyarakat dapat meningkatkan kualitas sosial.
b.	Desa Wisata Berkelanjutan		
9.	(Nicula & Spânu, 2014) — <i>Ways of Promoting Cultural Ecotourism for Local Communities in Sibiu Area</i> (Cara Mempromosikan Ekowisata Budaya bagi Masyarakat Lokal di Wilayah Sibiu).	Mempromosikan ekowisata budaya sebagai cara untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah Sibiu, Rumania.	Ekowisata budaya dapat menjadi produk wisata yang unik dan bermerek yang dapat diperluas ke tingkat regional dan nasional, memberikan dampak sosial yang baik bagi komunitas lokal.

10.	(Mudana, 2016) —Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.	Menggambarkan model pendampingan masyarakat digunakan untuk meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Pemuteran.	Pemberdayaan masyarakat di Desa Pemuteran tidak saja memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan dan sosial budaya, tetapi juga mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
11.	(Rizkianto, 2017)—Penerapan Konsep <i>Community-Based Tourism</i> Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek).	Mengetahui bagaimana Lembaga Desa Wisata Bangun menerapkan konsep CBT dan peran <i>stakeholder</i> .	Pengembangan lembaga desa wisata serta pengelolaan program Air Terjun Wonoasri merupakan hasil dari upaya masyarakat setempat untuk mengelola Desa Wisata Bangun.
12.	(Rahmat & Cahyadi, 2019)—Desa Wisata Berkelanjutan di Nglanggeran: Sebuah Taktik Inovasi.	Memahami proses inovasi di Desa Wisata Nglanggeran.	Proses inovasi dapat berjalan karena didorong oleh banyak faktor: melibatkan banyak pelaku, memiliki tim yang solid, berorientasi pada kebutuhan wisatawan, membangun komunikasi informal, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi di antaranya, minimumnya tata kelola risiko, serta sumber daya manusia.
13.	(Wijaya et al., 2021)— <i>Community Base Tourism</i> Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Desa Wisata Taro, Tegallalang, Gianyar Bali.	Mengkaji keterlibatan masyarakat lokal pada upaya menyokong pengembangan serta keberlanjutan Desa Wisata Taro	Taro mempunyai sejumlah potensi yang dapat dikembangkan serta diatahkan menjadi desa wisata berkelanjutan.
c.	Desa Wisata Berkelanjutan di Sleman		
14.	(Prakoso, 2015) —Pengembangan	Strategi untuk mengembangkan	Upaya pengembangan Desa Wisata Srowolan guna mempertahankan

	Wisata Pedesaan Berbasis Budaya yang Berkelanjutan di Desa Wisata Srowolan, Sleman.	wisata pedesaan yang berlandaskan budaya secara berkelanjutan di desa wisata Srowolan	kelestarian alam serta budaya. Daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas, pemberdayaan komunitas, pemasaran, dan kelembagaan adalah beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
15.	(Hulu, 2018) —Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus: Desa Wisata “Blue Lagoon” Di Kabupaten Sleman, DIY.	Mengetahui daya tarik wisatawan terhadap keberlanjutan desa wisata “Blue Lagoon”.	Kondisi lingkungan dan ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi daya tarik wisatawan, namun daya dukung lingkungan belum memperhatikan keberlanjutan.
16.	(Nina & Asmarani, 2019)—Perilaku Pariwisata Berkelanjutan Terhadap Pengembangan Agrowisata Salak Pondoh Sleman.	Menganalisis masyarakat Turi, Sleman yang mengusulkan budidaya salak pondoh untuk meningkatkan kunjungan wisata ke objek wisata desa di Turi, Kabupaten Sleman, DIY.	Pendaftaran hak paten salak pondoh karena masyarakat mulai menyadari potensi salak pondoh sebagai sumber pendapatan.
17.	(Aji, 2021) —Pengembangan Pariwisata Alam Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Desa Wisata Pentingsari.	Mengetahui pengembangan pariwisata alam yang mendukung dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan	Desa Wisata Pentingsari berhasil mengembangkan pariwisata berbasis alam sebagai daya tarik wisata melalui penerapan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan.
d.	Desa Wisata Pancoh		
18.	(Wityaningsih & Yuliastuti, 2017) —Identifikasi Kesiapan <i>Homestay</i> Untuk Keberlanjutan Desa Wisata Pancoh, Kabupaten Sleman.	Mengidentifikasi kesiapan <i>homestay</i> sebagai fasilitas penyokong aktivitas wisata di Desa Wisata Pancoh.	Standar akomodasi pariwisata belum dipenuhi oleh sebagian besar <i>homestay</i> . Akan tetapi, memungkinkan interaksi sosial dan budaya antara penghuni dan pengunjung.
19.	(S. Purwanto, 2017) —Ekowisata Sebagai Upaya Pengelolaan Pariwisata	Mengetahui bagaimana desa wisata Pancoh mengembangkan pengelolaan ekowisata	Partisipasi masyarakat setempat merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata. Pengembangan program serta aktivitas dengan landasan konsep ekowisata yang terus dijaga sebagai

	Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pancoh).		daya tarik serta mempunyai daya saing.
20.	(Masjhoer & Dzulkifli, 2019) —Analisis Kepuasan Wisatawan Di Desa Ekowisata Pancoh, Kabupaten Sleman.	Mengetahui seberapa puas pengunjung serta kinerja dari atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang terdapat di Desa Ekowisata Pancoh.	Kepuasan wisatawan terdapat pada tersedianya keberagaman produk, sedangkan komponen amenitas masuk kategori cukup puas.
21.	(Endiyanti & Sarwadi, 2021) —Pengelolaan Ekowisata Di Desa Wisata Pancoh, Turi, Sleman, Yogyakarta.	Mengeksplorasi aspek pengelolaan Desa Wisata Pancoh dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat.	Seluruh bagian pengelolaan melibatkan masyarakat. Meskipun partisipasinya kurang pada tahap perencanaan. Pengelola menggunakan pendekatan personal secara intensif dalam aspek penggerakan, dan partisipasi masyarakat meningkat dalam aspek pengawasan. Aspek penilaian menunjukkan bahwa pelibatan penuh masyarakat setempat pada proses pengembangan, pengelolaan, serta penggunaan sumber daya.
22.	(Widianingrum, 2022)—Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Pancoh.	Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pancoh.	Terdapat tiga tahapan partisipasi masyarakat. Pada tahapan perencanaan, masyarakat memberikan saran dan kritikan mengenai pembentukan dan kepengurusan pengembangan. Pada tahapan-tahapan pelaksanaan terdapat pemberian gagasan kreatif perbaikan sarana dan partisipasi tenaga kerja. Tahapan ketiga yaitu evaluasi; terdapat kritik dan saran melalui rapat yang dilaksanakan tiga bulan sekali.

Sumber: Data Diolah (2023).

Mengacu pada penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, topik penelitian ini belum banyak ditemukan pada penelitian terdahulu. Dengan kata lain, masih minimnya penelitian yang dilakukan atau tergolong baru sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebaruan penelitian dari aspek teoritis melalui analisis konsep kebijakan *green economy* di desa wisata secara berkelanjutan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan aspek praktisnya pada model usulan/rekomendasi penerapan

kebijakan *green economy* guna menciptakan desa wisata berkelanjutan.

Terdapat hal yang berbeda dalam penelitian terkait dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni pada teori dan tujuan, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan dengan studi kasus di Desa Ekowisata Pancoh. Penelitian menggunakan teori yang merujuk pada konsep *green economy* Purwanto, P. (2020) dan Amerta et al. (2018) yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya serta merujuk pada panduan Kemenparekraf tentang desa wisata berkelanjutan terutama pada aspek pengelolaannya.

2.2. Tinjauan Teoritis.

2.2.1. Administrasi Publik.

Administrasi publik secara umum didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan, serta bagaimana pemerintah mengelola organisasi publik. Administrasi publik berfokus pada pengelolaan sumber daya dan personel di lembaga-lembaga pemerintahan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Banyak ahli telah mengemukakan definisi mengenai administrasi, salah satunya adalah Wilson. Sebagai pelopor studi administrasi publik, Wilson mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memisahkan ranah administrasi dan ranah politik. Menurut Wilson, administrasi publik seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan kebijakan daripada keterlibatan dalam proses pembuatannya (Wilson, 1887). Waldo berpendapat bahwa pengertian administrasi publik mencakup manajemen serta tatakelola sumber daya manusia dan peralatan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Menurutnya, administrasi publik adalah tentang prinsip dan etika dalam menjalankan pemerintahan, bukan hanya operasi mekanik (Anwaruddin, 2004). White

berpendapat bahwa administrasi publik merupakan proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Administrasi publik bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif (White, 1948). Menurut Nigro dan Nigro, administrasi publik mencakup proses kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara, di mana manajemen sumber daya publik memiliki peran penting dalam pelaksanaannya (Nigro, Felix A and Nigro, 1970), (Pusparani, 2021). Sedangkan Simon mengartikan administrasi publik sebagai proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi publik. Pengambilan keputusan rasional adalah dasar administrasi publik (Simon, 1947), (Rosana, 2018).

Administrasi publik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas utamanya meliputi pengorganisasian, pengoordinasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Henry, 2015). Administrasi publik juga berusaha untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan lembaga negara dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengelolaan anggaran publik, manajemen sumber daya manusia, penyusunan kebijakan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Administrasi publik juga mencakup hubungan pemerintah dengan masyarakat serta organisasi nonpemerintah yang berperan dalam pelayanan publik. Administrasi publik didefinisikan dalam literatur di atas sebagai ilmu dan seni mengelola kebijakan publik dan sumber daya publik untuk mencapai tujuan negara.

2.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi sebagai ilmu disiplin menunjukkan dinamika yang ditandai oleh perubahan pendekatan dari waktu ke waktu. Dinamika tersebut muncul akibat perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai lokus dan fokus kajian administrasi.

Jika sebelumnya administrasi publik terbatas pada lembaga pemerintahan, fokusnya sekarang beralih ke kepentingan publik dan kebijakan publik. Fokus administrasi publik pada manajemen, ilmu politik, dan implementasi kebijakan (Rodiyah et al., 2021).

Paradigma administrasi publik sering mengalami pergeseran seiring perkembangan waktu, dimulai dari era *administration dichotomy* hingga era *governance*, dilanjutkan konsep *collaborative governance*. Menurut Khun dalam (Pasolong, 2016) Paradigma dapat didefinisikan sebagai perspektif, nilai, metode, prinsip dasar, atau metode untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Menurut Nicholas Henry (2007), (Thoha, 2015) paradigma administrasi publik terdiri dari enam perkembangan yakni:

1. *The Politics - Administration Dichotomy, (1900 – 1926);*

Pemerintah memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi politik, yang mencakup tanggung jawab pemerintah untuk membuat kebijakan atau mengembangkan aspirasi negara, sementara fungsi administrasi mencakup menjalankan kebijakan. Ini adalah perbedaan yang jelas yang membedakan administrasi dari politik. Paradigma ini menekankan lokusnya, atau di mana administrasi negara seharusnya berada.

2. *The Principles of Administration, (1927 – 1937);*

Paradigma ini menekankan pada fokus lebih penting dari lokus. Prinsip-prinsip administrasi negara mencerminkan perkembangan tersebut serta membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari pada semua tatanan administrasi tanpa memedulikan fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) adalah prinsip administrasi yang paling terkenal dari Gullick dan Urwick.

3. *Public Administration as Political Science, (1950 – 1970);*

Usaha untuk merevitalisasi hubungan antara ilmu politik dan administrasi negara

adalah fokus dari paradigma ketiga. Paradigma ini menempatkan fokus pada lokus, yaitu birokrasi pemerintahan, dan wilayah kepentingan. Dengan demikian, dari paradigma ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik harus dibangun dengan cara yang memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan; mengutamakan kepentingan umum; mengikutsertakan warga masyarakat; bertindak demokratis dan berpikir strategis; dan menghargai masyarakat.

4. *Public Administration as Management, (1956 – 1970);*

Paradigma administrasi sebagai manajemen menyediakan metode yang membutuhkan keahlian khusus, tetapi tidak jelas di mana keahlian itu harus diterapkan dalam lingkungan kelembagaan. Paradigma ini berpusat pada pembentukan ilmu administrasi murni yang didukung oleh kebijakan publik dan psikologi sosial. Lokasi menjadi tidak jelas karena setiap fokus dianggap berlaku tidak hanya di bidang administrasi.

5. *Public Administration as Public Administration, (1970 – sekarang);*

Menurut paradigma administrasi publik ini, administrasi publik merupakan ilmu mandiri dengan teori, istilah, objek, dan metodenya sendiri. Ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, pembuatan kebijakan, dan analisis serta metode pengukuran telah menjadi fokus utama administrasi publik. Aspek perhatian paradigma ini menghubungkan mata rantai antara locus dan fokus administrasi publik. Di sini, teori organisasi, praktik analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen adalah fokusnya. Namun, locus normatifnya terletak pada birokrasi pemerintahan dan masalah publik (*public affairs*).

6. *Governance, (1990 – sekarang).*

Konsep ataupun pandangan yang berkembang paling akhir merupakan

"governance". "Governance" merujuk pada cara pemimpin politik menggunakan kekuatan mereka untuk memastikan kesejahteraan warga negara. Berbagai sektor masyarakat bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan, serta menyebarkan kebijakan publik, yang berdampak secara nyata pada kelembagaan, masyarakat, dan pembangunan ekonomi dan sosial. Ini membuat proses ini rumit (Tamayao, 2014). Paradigma ini merupakan paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintahan. Paradigma ini mengutamakan administrasi publik daripada mengendalikan warga. Upaya ini adalah untuk membuat warga mengendalikan kebijakan publik, hukum, organisasi, dan lembaga. Perbedaan antara organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, dan nirlaba mulai tidak jelas, dan penggunaan teknologi informasi sedang merestrukturisasi organisasi. Menurut (Dahlia, 2023) Dalam governansi pemerintahan, sinergi diperlukan antara ketiga aktor yang ada: pemerintah (publik), masyarakat (masyarakat sipil), dan pihak swasta. Ketiga aktor ini diposisikan berdasarkan kapasitas serta ruang lingkup masing-masing, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara.

Berdasarkan pandangan dari sejumlah ahli tersebut, administrasi publik terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dari pendekatan klasik yang menekankan efisiensi hingga paradigma terbaru yang menekankan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, setiap paradigma memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam konteks kebijakan *green economy* desa wisata, paradigma prinsip-prinsip administrasi dapat digunakan dalam pengelolaan desa wisata dengan menetapkan struktur yang jelas, pembagian tugas yang efektif, serta koordinasi antara lembaga pemerintah, warga setempat, dan sektor bisnis guna keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

2.2.3. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut para ahli bervariasi, namun secara umum

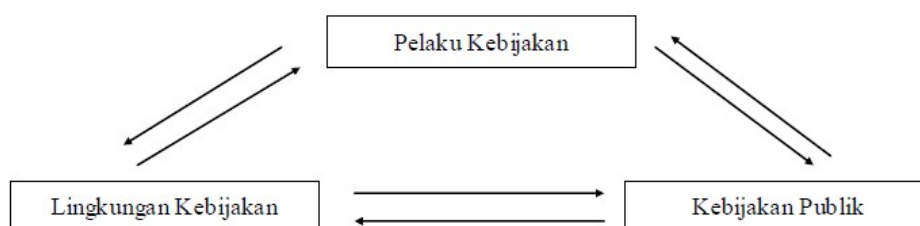
mencakup pandangan tentang bagaimana pemerintah membuat keputusan untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Thomas R. Dye (1972) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pengambil kebijakan untuk memutuskan atau tidak mengambil tindakan (Suwitri, 2014). Dengan kata lain, pemerintah mengambil keputusan atau tindakan untuk mengatasi berbagai problem publik, baik secara aktif maupun pasif, disebut kebijakan publik. David Easton (1950), (Magriasti, 2019) memandang kebijakan publik sebagai proses alokasi nilai-nilai melalui cara otoritatif untuk semua anggota masyarakat. James E. Anderson (1975) mengartikan mekanisme resmi dari pemerintah untuk mendistribusikan atau mengatur sumber daya dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat (Erman & Frinaldi, 2021). Penekanan dalam pengertian tersebut terletak pada kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang disusun secara terencana untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

William N. Dunn (2015), (Muadi et al., 2016) memandang kebijakan publik sebagai bentuk respons pemerintah terhadap persoalan-persoalan publik melalui sejumlah tindakan yang dirancang guna meraih tujuan tertentu (*a public policy is a governmental response to public issues that involves deliberate actions to achieve certain goals*). Menurut Dunn, kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup tahapan sejak identifikasi masalah hingga implementasi solusi yang telah direncanakan. Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirumuskan dan diajukan oleh seorang aktor maupun kelompok aktor, yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu dalam suatu konteks atau situasi sosial, politik, dan ekonomi. Formulasi kebijakan ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur, di mana setiap langkah diarahkan untuk menjawab kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat (Yuniningsih, 2017). Melalui pandangannya, kebijakan publik menyoroti aspek distribusi kekuasaan dan alokasi sumber daya dalam

proses pengambilan keputusan. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bersifat otoritatif dan melibatkan berbagai pihak, serta dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan publik (Suaib et al., 2022) terdiri dari:

1. Masalah publik (*public issue*), merupakan masalah yang diidentifikasi di masyarakat yang memerlukan campur tangan pemerintah. Misalnya, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, atau perubahan iklim.
2. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), proses di mana alternatif kebijakan dirancang dan dievaluasi untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.
3. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), setelah kebijakan dirumuskan, kebijakan tersebut harus dijalankan atau diimplementasikan, hal ini bisa melibatkan lembaga pemerintah, aktor swasta, atau masyarakat sipil.
4. Evaluasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah diterapkan dievaluasi untuk mengetahui apakah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut Dunn (1994), (R. H. Ayuningtyas & R, 2018), (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) sistem kebijakan (*policy system*) terdiri dari tiga komponn yang berinteraksi satu dengan lainnya yang divisualisasi sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Sistem Kebijakan Dunn

Sumber: (R. H. Ayuningtyas & R, 2018)

Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (*policy content*), adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah tentang urusan publik, termasuk keputusan untuk melakukan apa pun.
2. Aktor maupun pemangku kebijakan (*policy stakeholders*) merupakan individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam proses kebijakan. Mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi maupun dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan yang ditetapkan, sehingga keberadaannya menjadi bagian integral dalam dinamika perumusan dan implementasi kebijakan publik.
3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) dapat dipahami sebagai kondisi atau situasi tertentu di mana suatu kebijakan dijalankan. Konteks ini dipengaruhi secara timbal balik oleh aktor kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri, sehingga membentuk dinamika yang menentukan efektivitas perumusan kebijakan.

Dengan demikian, pengertian kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang diambil dalam perumusannya melalui beberapa tahapan guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditentukan bagi kepentingan orang banyak.

2.2.4. Implementasi Penerapan Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah implementasi dimaknai sebagai penerapan maupun pelaksanaan, yang menunjukkan bahwa kedua kata tersebut adalah sinonim (sama arti). Istilah penerapan dan implementasi kebijakan pada dasarnya sama dan dapat digunakan secara bergantian karena keduanya berarti pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana atau konsep/teori kebijakan ke dalam praktik yang nyata untuk meraih rencana yang ditentukan. Implementasi kebijakan merupakan proses di mana kebijakan diubah menjadi program, aturan, atau prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang terlibat dan bekerja sama, meliputi pemerintah, pelaksana, dan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dengan tujuan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses ini mencerminkan tahapan operasional dari kebijakan publik, di mana instrumen dan mekanisme yang dirancang diarahkan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan normatif yang telah dirumuskan (Amanda, 2020). George C. Edwards III (1980) menyebutkan bahwa fase implementasi kebijakan adalah fase di mana kebijakan yang dirumuskan dihubungkan dengan dampak kebijakan tersebut di lapangan (Nurlailah, 2021)

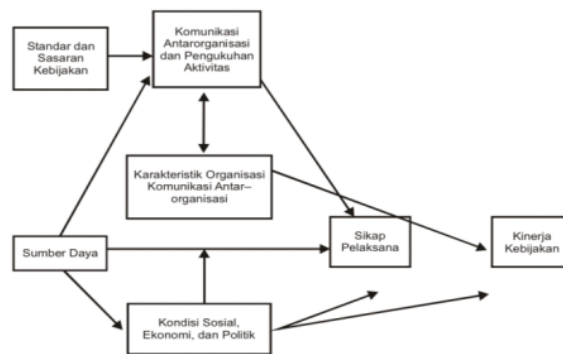
Merilee Grindle (2017), berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukan hanya pelaksanaan keputusan kebijakan. Implementasi adalah proses politik yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan sosial lingkungan, serta hubungan antara aktor-aktor yang terlibat (Utami & Welas, 2019). Mazmanian dan Sabatier (1983) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah strategi untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi program yang berfungsi. Mereka berkonsentrasi pada bagaimana keadaan di lapangan, dukungan politik, dan ketersediaan sumber daya memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (N. Siregar, 2022)

Pada implementasi kebijakan, terdapat sejumlah pendekatan dan pandangan kebijakan yang dijabarkan seperti berikut :

- 1) Model implementasi berdasarkan pandangan Van Meter dan Van Horn.

A Model of the Policy Implementation Process dikenalkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai sebuah model implementasi kebijakan. Model ini menegaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel independen yang saling berinteraksi, sehingga efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh keterkaitan antarvariabel dalam keseluruhan proses

kebijakan.



Gambar 2. 2
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber: (Fauziyah, Wennyta Eka and Arif, 2021)

Penjelasan Gambar bagan di atas sebagai berikut:

- Tujuan standar serta kebijakan yang jelas, adalah detail tujuan yang ingin dicapai dan pedoman untuk mengukur pencapaiannya.
- Sumber daya (biaya atau berbagai intensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi) Sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*) diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Karena sumber daya ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan, kebijakan memerlukan ketersediaan sumber daya untuk mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- Kualitas hubungan interorganisasi.

Untuk menjalankan program dengan efektif, organisasi harus bekerja sama dan saling mendukung. Prosedur dan mekanisme kelembagaan sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

- Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana.

Agen pelaksana yang dimaksud adalah struktur birokrasi, norma-norma, dan

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya berdampak pada pelaksanaan program.

e. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Sumber daya ekonomi lingkungan yang tersedia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, jumlah kelompok kepentingan yang memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan turut menentukan efektivitasnya. Diharapkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga pelaksanaan kebijakan publik dapat dilakukan dengan mudah.

f. Disposisi/Tanggapan atau sikap para pelaksana.

Tiga komponen penting dalam disposisi implementor meliputi: (1) Respons implementor terhadap kebijakan merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesediaannya dalam melaksanakan kebijakan. (2) Kognisi, yakni pemahaman implementor mengenai substansi kebijakan, menjadi aspek penting yang menentukan kualitas penerapan. (3) Intensitas disposisi implementor mencerminkan kecenderungan nilai dan sikap yang dimiliki, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap konsistensi serta efektivitas implementasi kebijakan.

2) Model Implementasi Kebijakan Menurut George Charles Edwards III.

Edwards III mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang berpengaruh penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi.

Salah satu syarat penerapan kebijakan yang berhasil adalah implementator harus memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang harus dilakukan. Untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, tujuan dan kelompok sasaran kebijakan. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak

diketahui oleh kelompok sasaran, ini dapat menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya (*resources*).

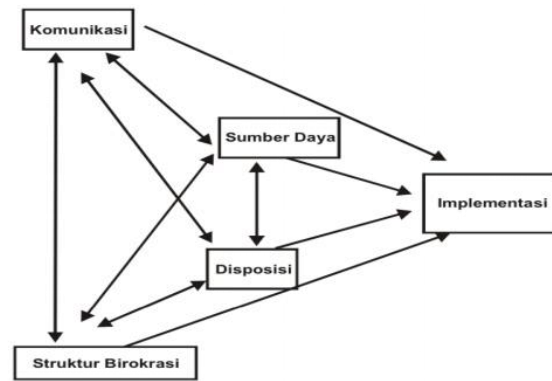
Sumber terdiri dari sumber daya manusia dan keuangan sangat fundamental untuk terwujudnya efektivitas penerapan kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika implementor tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.

c. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan).

Disposisi merupakan sifat dan atribut yang harus disandang oleh seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka dapat menjalankan kebijakan secara optimal dan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, namun jika sikap dan pandangan implementor berbeda, implementasi kebijakan akan terganggu serta tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi.

Penerapan kebijakan yang optimal dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang akuntabel. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu komponen struktur penting dari setiap birokrasi. SOP memberikan petunjuk tentang bagaimana setiap pelaksana kebijakan harus bertindak. Struktur organisasi yang terlalu luas dan kompleks dapat menyebabkan lemahnya pengawasan serta munculnya prosedur birokrasi yang berbelit dan kompleks, sehingga menghambat birokrasi yang bersih.

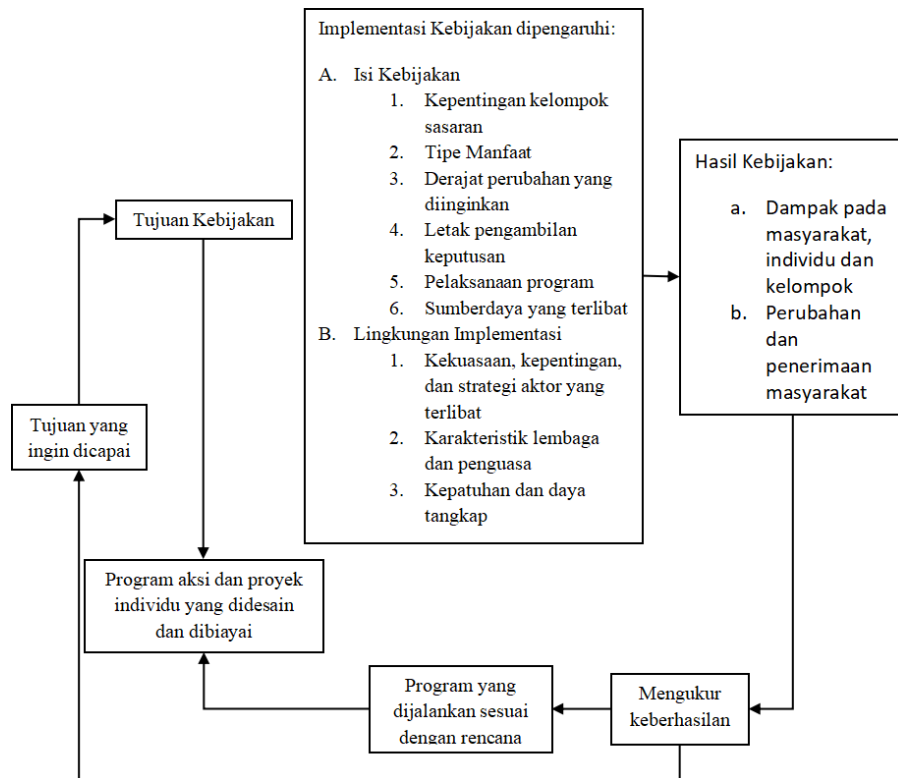


Gambar 2. 3
Model G.C Edwards III
Sumber: (Suwitri, 2014)

3) Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Dua variabel utama, menurut teori Merilee S. Grindle, memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi: kelompok sasaran atau *target group* yang akan diatur dalam naskah kebijakan, manfaat yang akan diperoleh kelompok sasaran, dampak perubahan yang akan diperoleh, ketepatan lokasi program, penyebutan implementator kebijakan dengan jelas, ketersediaan sumber daya pelaksanaan program yang memadai.
- b. Konteks implementasi (*context of implementation*) yaitu: keterlibatan para aktor dalam menyusun strategi dan melaksanakan kebijakan; kelembagaan dan kekuasaan yang dijalankan pemerintah; dan tingkat responsivitas dan ketaatan sasaran kebijakan.



Gambar 2. 4
Model Kebijakan Merilee S.Grindle
Sumber: (N. Siregar, 2022)

1) Model implementasi Sabatier dan Mazmanian.

Fokus model ini adalah kondisi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, sebagai berikut:

a. Kondisi Kebijakan yang Jelas dan Konsisten.

Kejelasan tujuan kebijakan yang dapat dihitung dan dirumuskan dengan terpadu dan konsisten.

b. Teori Implementasi yang Valid.

Kebijakan yang akan diambil dan berdampak pada hasil harus didasarkan pada teori atau hipotesis yang masuk akal. Kegagalan implementasi akan terjadi jika kebijakan tidak akurat atau tidak realistis.

c. Struktur Implementasi.

Struktur implementasi yang mendukung efektifitas kebijakan meliputi:

lembaga yang berwenang, sistem pengawasan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Terdapat tiga komponen utama dalam struktur implementasi, yaitu: Kapasitas administratif terdiri dari kualitas birokrasi dan sumber daya manusia lembaga pelaksana kebijakan. Sumber daya yang cukup terdiri dari ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan dukungan politik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sistem pengawasan dan kontrol terdiri dari mekanisme evaluasi dan kontrol untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.

d. Kondisi Eksternal yang Mendukung

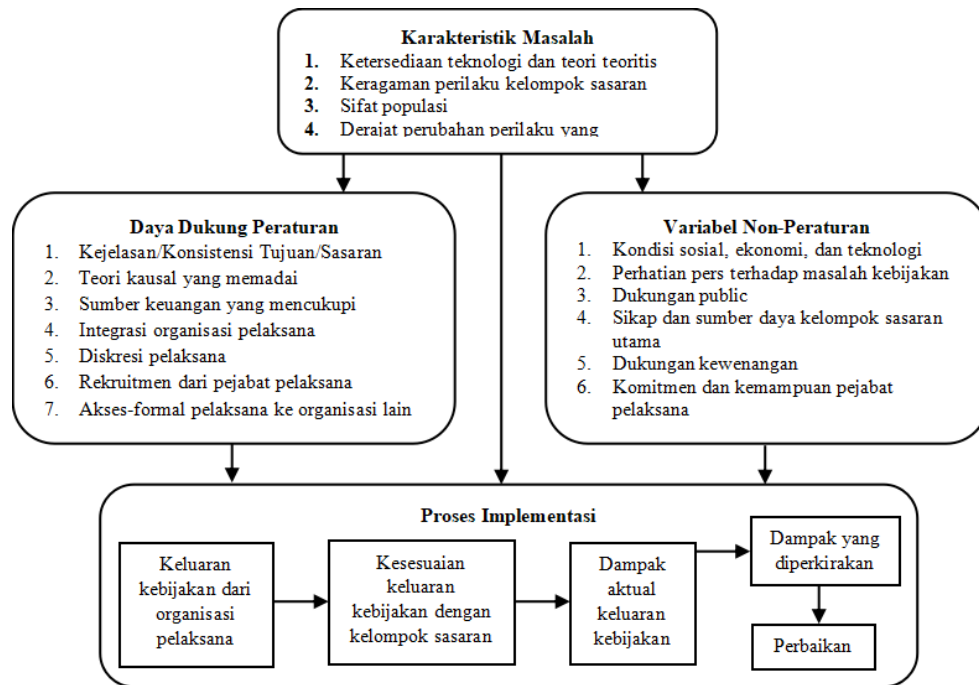
Faktor-faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, sosial, dan politik juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang mendukung dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sedangkan penghambatnya yaitu ketidakstabilan atau penolakan dari aktor eksternal.

e. Dukungan Pemangku Kepentingan.

Kebijakan harus diterima dan diterapkan dengan dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pejabat politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Jika kebijakan mendapat banyak penolakan, pelaksanaannya akan terhambat.

f. Adaptabilitas dalam Pelaksanaan

Kebijakan harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, dan pelaksana harus dapat menanggapi perubahan di lapangan tanpa meninggalkan tujuan awal kebijakan.



Gambar 2. 5
Model Sabatier dan Mazmanian
Sumber: (N. Siregar, 2022)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan siklus implementasi kebijakan yang dirancang, disusun, dan ditetapkan oleh pengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah, mencapai tujuan yang efektif sesuai harapan.

2.2.5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh *The Brundtland Commission* sebagai pembangunan yang mampu menyediakan kebutuhan saat ini sambil mempertahankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Antasari, 2019). Asas-asas pembangunan berkelanjutan perlu berjalan secara beriringan. Jika pembangunan kurang mengutamakan keseimbangan, maka pembangunan akan terjebak dalam pola konvensional yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, sementara aspek sosial dan lingkungan terabaikan (H. Daly, 1990). Menambahkan sejumlah aspek berkaitan dengan pengertian operasional pembangunan berkelanjutan, di

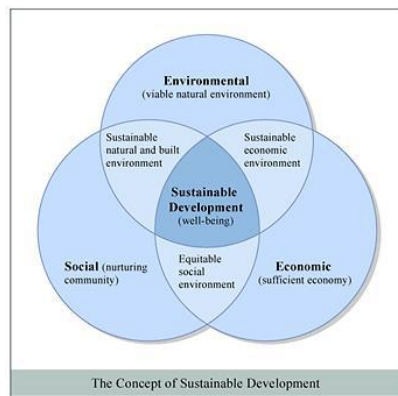
antaranya: sumber daya manusia, lembaga pelaksana kebijakan, dan tingkat birokrasi menentukan kapasitas administratif. Ketersediaan sumber daya yang memadai mencakup dukungan finansial, teknologi yang memadai, serta dukungan politik guna menunjang pelaksanaan kebijakan. Untuk menjamin dilaksanakannya suatu kebijakan dengan benar, sistem pengawasan serta kontrol terdiri dari mekanisme evaluasi dan kontrol.

Menurut Perman & Stren (2001) Definisi konsep keberlanjutan adalah meningkatnya konsumsi dan utilitas masyarakat serta efektivitas pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan peluang produksi masa depan (P. N. Sari & Khomsiyah, 2024). Selanjutnya J.K. Hall et al (2010) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar yang menentukan keberlanjutan, yaitu: 1) Perlakuan yang menguntungkan saat ini dan di masa mendatang; 2) Mengakui bahwa aset lingkungan meningkatkan kemakmuran ekonomi; dan 3) Memahami tantangan yang timbul sebagai akibat dari dampak pada aset lingkungan (Parmawati, 2018).

Selain definisi yang disampaikan diatas, Haris (2000) menguraikan tiga aspek dari konsep keberlanjutan (Rahadian, 2016) yaitu: secara ekonomi, pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara konsisten untuk mempertahankan keberlanjutan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Pada sistem lingkungan, fungsi penyerapan lingkungan yang baik, merawat sumber daya secara stabil, dan mencegah eksploitasi sumber daya alam. Secara sosial, tercapai sistem penyediaan layanan publik dasar, kesetaraan gender, dan akuntabilitas.

Menurut Pearce et al. (1988), Rogers (2008), tujuan utama pembangunan berkelanjutan (Masjud, 2018) ada dua: (1) memanfaatkan potensi alam dengan laju yang tidak melebihi kemampuan alam untuk penyediaan sumber daya kembali; (2) penggunaan alam dengan hasil limbah lebih rendah dibandingkan dengan laju pembentukan limbah

dan laju penghancurannya oleh alam. Gambaran konsep Rogers ini sebagai berikut:



Gambar 2. 6
Konsep Rogers tentang Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: (Masjud, 2018)

Sutamihardja (2004), (I. N. S. Arida, 2016) lebih lanjut menyebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi usaha untuk menciptakan pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan antargenerasi (*intergenerational equity*), yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan harus memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, diarahkan pada sumber daya alam yang dapat diganti, dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam.

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan adalah upaya menjaga ekosistem dengan cara melestarikan lingkungan dan memperbaiki masyarakat sambil mengejar pembangunan ekonomi. Tiga komponen penting dari konsep berkelanjutan tersebut adalah kondisi manusia yang diinginkan, ekosistem yang bertahan lama, dan keseimbangan antara generasi sekarang dan masa depan. Di samping itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud tidak hanya melalui kolaborasi antara pemerintah secara vertikal dan horizontal, tetapi juga memerlukan modal sosial untuk mendorong sinergi

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan (Suparmoko, 2020). Dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan saling terhubung, sehingga perubahan pada satu dimensi dapat berdampak pada yang lainnya (Setianingtias et al., 2019).

Untuk mencapai keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan (I. N. S. Arida, 2016), seperti keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan, aspek pendekatannya dijelaskan sebagai berikut:

a) Aspek ekologis.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan memiliki dampak bagi generasi yang akan datang. Sebaliknya, kerusakan lingkungan yang memengaruhi punahnya ekosistem kehidupan. Pelestarian lingkungan hidup dapat mendukung keberlangsungan hidup generasi masa berikutnya (Rosana, 2018). Upaya untuk memastikan ekologi berkelanjutan dilakukan dengan menjamin tata kelola lingkungan terintegrasi, menjaga kelestarian lingkungan hayati, dan mencegah pencemaran limbah.

b) Aspek Ekonomi.

Dari aspek ekonomi, keberlanjutan diukur dengan berjalannya reformasi makroekonomi yang meliputi optimalisasi efisiensi pada layanan publik, peningkatan jumlah tabungan domestik, ketepatan pengelolaan nilai tukar, reformasi birokrasi, efektivitas mekanisme pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan distribusi pendapatan dan kepemilikan aset.

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu, penting mengindahkan keberlanjutan

aktivitas dan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain: pertama, sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangible dalam kerangka akuntansi ekonomi; kedua, secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Selanjutnya, diharuskan mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya, baik sumber yang terpulih, tidak terpulih, maupun lingkungan hidup. Sumber yang terpulihkan, seperti hutan, dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak memperlakukannya sebagai bagian dari produktivitas ekonomi; namun, hutan berfungsi pasif atau jasa yang mengalir menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumber daya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumber daya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumber daya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh sumber daya ini tidak menciut, akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya.

c) Aspek Sosial Budaya.

Secara menyeluruh, keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- 1) Kestabilan masyarakat membutuhkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, peran dan status perempuan yang lebih baik, dan lingkungan keluarga yang mendukung

secara efektif.

- 2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan melawan kemiskinan dan menurunkan kemiskinan total. Jika terjadi kesenjangan dalam distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial, keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai. Dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, keberlanjutan sosial dapat dimungkinkan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, kelas sosial yang dihilangkan dapat memperoleh akses pendidikan yang merata, pemerataan dalam pemulihan lahan, dan peningkatan peran wanita. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

d) Keberlanjutan Politik.

Keberlanjutan politik bergantung pada perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial,

dan politik. Proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab juga diperlukan untuk keberlanjutan politik.

e) Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Keamanan yang berkelanjutan mencakup menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan dari dalam dan luar yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan negara dan bangsa.

Mengintegrasikan konservasi dan pembangunan berkelanjutan itu sulit, tetapi organisasi yang ditugasi dengan mandat ini harus bergerak maju dengan implementasi *Adaptive Co-Management* (ACM), sebuah pendekatan yang menyatukan fungsi pembelajaran adaptasi dengan fungsi menghubungkan kolaborasi, telah diidentifikasi sebagai cara yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan upaya konservasi. Studi yang dilakukan (Baird et al., 2018) menemukan bahwa kegiatan dengan konsep ACM sangat berorientasi pada keterpaduan tujuan konservasi dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan berbagai macam aktor pada upaya implementasi di lapangan dan kegiatan pengambilan keputusan, menciptakan ruang baru untuk interaksi antara peserta yang berkontribusi pada kemampuan menjembatani mereka, dan memanfaatkan jaringan sosial, aset yang tersedia, dan kontribusi individu untuk memungkinkan tindakan dalam mengejar mandat integratif mereka.

Upaya menggabungkan ekonomi dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dirumuskan melalui paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya yang seoptimal mungkin (Burhanuddin, 2016). Dibutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan—pertumbuhan ekonomi yang mempertahankan penggunaan sumber daya alam—dan strategi integrasi lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi agar

pembangunan dapat meningkatkan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dalam pengelolaan sumber daya, istilah "keselarasan" dan "keseimbangan" menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada dua prinsip: prinsip ekonomi untuk memenuhi hajat hidup manusia dan prinsip pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada pengelolaan yang bertanggung jawab dan etika ekonomi yang berkeadilan.

2.2.6. Konsep *Green Economy*

Konsep ini berawal dari *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989 yang dibuat oleh ekonom yang menginginkan pemerintah Inggris Raya menangani masalah lingkungan merupakan landasan adanya konsep *green economy* (Barbier, 2010), (Lavrinenko et al., 2019), (Kusumaningrum & Safitra, 2020). Konsep ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menekan emisi karbon, serta menghentikan degradasi ekosistem. Terminologi ini semakin dikenal luas saat terjadinya krisis 2008. Atas inisiasi *the United Nations Environment Programme* mendorong para pemangku kepentingan untuk beralih ke industri yang lebih ramah lingkungan sebagai upaya mendukung investasi di sektor industri hijau (Retnosuryandari, 2024).

Menurut UNEP, fokus *green economy* adalah pada kesetaraan dan kesejahteraan sosial, dan diperlukan upaya untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Selanjutnya, (Makmun, 2017) menjelaskan bahwa *green economy* dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain: meningkatnya investasi hijau dari sektor publik maupun swasta, meningkatnya kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan di sektor ramah lingkungan, pengurangan polusi dan emisi karbon dioksida, pengurangan pola konsumsi sampah, dan pengurangan penggunaan sumber daya dan energi dalam proses produksi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan penghematan sumber daya melalui teknologi untuk

meminimalkan dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi.

Perkembangan konsep *green economy* adalah peningkatan investasi dan inovasi yang terus meningkat untuk keberlanjutan pembangunan sebagai konsep umum meliputi aspek efisiensi, peningkatan pendapatan, dan upaya untuk mengurangi risiko pemanfaatan sumber daya dengan tujuan mewujudkan transisi yang berkelanjutan (Loiseau et al., 2016), (Febrian, 2022). Konsep *green economy* adalah model untuk mencapai perlindungan lingkungan dan menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Metode ini menggunakan prinsip-prinsip yang mengakui nilai investasi dalam sumber daya alam dan menekan angka kemiskinan serta menaikkan taraf kesetaraan sosial dan kesempatan kerja (Hidayattuloh et al., 2020). *Green Economy Coalition* (2010) mengartikan konsep ini sebagai sistem ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kualitas hidup serta mempertahankan lingkungan Bumi. Selanjutnya, ICC (2012) mengartikan *green economy* sebagai suatu sistem perekonomian yang menggabungkan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan sosial. Dalam hal ini, para *stakeholder* dari unsur bisnis dan industri berperan penting dalam memenuhi kebutuhan, penggunaan teknologi, proses layanan, dan kebijakan terbaik bagi penyelesaian masalah ekonomi (Kusumaningrum & Safitra, 2020). Berikutnya, *green economy* juga dimaknai sebagai ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja sembari mengurangi emisi serta pencemaran lingkungan melalui penggunaan sumber daya dan energi yang efisien untuk mencegah kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Anwar, 2022).

Menurut Bappenas RI, prinsip utama *green economy* adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sembari mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Fokus *green economy* adalah mendorong investasi yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan infrastruktur serta aset untuk kelangsungan, menjamin proses

transisi yang memegang prinsip keadilan serta terjangkau, dan meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (Silalahi, 2022). Definisi ini sejalan dengan pendapat H. Stoddart (2019) dalam *Earth Summit* yang menyatakan bahwa *green economy* mencakup berbagai kebijakan yang dapat diterapkan, seperti pemerataan ekonomi, kesejahteraan yang berkeadilan, dan kelestarian sumber daya lingkungan yang terjaga untuk generasi mendatang (Asrudi & Puspa, 2021; Bina, 2013). Dalam upaya guna memperbaiki ekonomi pasca pandemi COVID-19, integrasi antara ekonomi digital, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan *green economy* mengarah pada terbentuknya paradigma baru yang membuka peluang bagi pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi dalam konteks krisis terkini (Ciocoiu, 2011).

Tantangan dalam penerapan *green economy* sebagaimana yang terjadi di Amerika Utara mengemukakan bahwa implementasi di Amerika Utara berada di persimpangan jalan yang kritis. Saat ini yang terjadi yaitu adanya tiga disinsentif pasar meliputi: subsidi yang merusak lingkungan, insentif berbasis pasar yang tidak cukup, dan dukungan publik yang tidak mencukupi bagi swasta. Strategi kebijakan pertumbuhan hijau memerlukan peningkatan inovasi hijau melalui penghapusan dan rasionalisasi subsidi secara bertahap, pengembangan instrumen yang berbasis pasar, dan alokasi pendapatan yang diperoleh (Barbier, 2016). Inovasi hijau adalah upaya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Eco-inovasi relevan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan, penerapan, dan pengenalan konsep baru, tindakan, produk, maupun proses yang ikut serta dalam mengurangi beban lingkungan maupun mendukung keberlanjutan lingkungan (Klemmer, 1999), (Setyawati et al., 2014).

Terdapat tiga indikator kinerja *green economy* menurut (P. Purwanto, 2021), yaitu:

- 1) aspek ekonomi, yang meliputi peningkatan nilai tambah dan efisiensi penggunaan

sumber daya; 2) aspek lingkungan, yaitu berupa penurunan dampak negatif dan pengurangan jumlah timbulan sampah; dan 3) aspek sosial, yaitu mencakup peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan. Sedangkan perangkat *green economy* meliputi: keefisiensi, produksi bersih (*cleaner production*), lapangan kerja hijau (*green jobs*), *green investment*, *sustainable production and consumption*, dan *green lifestyle*.

UNEP lebih lanjut mengembangkan *Green Economy Index* (GEI) untuk membantu negara-negara yang menjalankan *green economy* melalui komitmen kebijakan, investasi, dan pembelanjaan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti energi terbarukan, produksi bersih, transportasi hijau, pengolahan limbah, bangunan hijau, pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Bappenas Republik Indonesia membuat Indeks *Green Economy* Indonesia yang menilai tingkat transformasi ekonomi Indonesia dengan mengukur tingkat kemajuan indikator nilai minimal dibandingkan dengan target maksimal yang ingin dicapai. Indikator nilai minimum mengacu pada titik terendah pada data Indonesia sebelumnya. Selanjutnya, indikator nilai maksimum ditetapkan berdasarkan pencapaian yang diharapkan pada tahun 2045 serta *Net Zero Emission* 2060.

Lima belas indikator telah ditetapkan oleh GEI Indonesia berdasarkan konsep *green economy*. Indikator ekonomi terdiri dari kinerja sumber daya manusia pada sektor industri, jasa, pertanian, PDRB, efisiensi energi, dan pengurangan emisi. Indikator sosial yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, persentase kemiskinan dan pengangguran terbuka. Selanjutnya indikator lingkungan diketahui dari tingkat tutupan lahan terhadap total luas daratan Indonesia, proporsi sumber energi baru terbarukan, persentase sampah yang berhasil dikelola, persentase penurunan emisi kumulatif dibandingkan dengan baseline, serta tingkat penurunan tutupan lahan gambut (Muamar, 2022).

Setidaknya terdapat empat dimensi utama dari *The Global Green Economy Index* yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara mendorong penerapan *green*

economy. Keempat dimensi tersebut mencakup komitmen dari pengambil keputusan, kebijakan yang berorientasi ramah lingkungan, serta kegiatan bernilai ekonomi, misalnya pariwisata berbasis lingkungan (Setiawan et al., 2020). Salah satu komponen yang memengaruhi indikator *green economy* adalah pariwisata, yang sangat tepat jika diterapkan pada negara-negara yang menerapkan bentuk pariwisata berkelanjutan, termasuk desa wisata. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa gagasan ini akan memungkinkan masyarakat lokal (masyarakat desa) untuk mengembangkan potensi desanya dengan prinsip-prinsip lokal (*local genius*). Dengan demikian, pengembangan ekonomi desa akan secara tidak langsung mempertahankan elemen adat istiadat yang berlaku (Prayogi et al., 2022).

Di negara-negara Asia berpenghasilan tinggi, pariwisata memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan PDB yang berkelanjutan. Namun, di negara-negara Asia berpenghasilan rendah, pariwisata menjadi hambatan bagi pertumbuhan *green economy* jangka panjang. Negara-negara Asia dengan pendapatan rendah diharapkan untuk memperkuat kebijakan ekowisata, mendorong regionalisme hijau, serta mengembangkan pasar keuangan hijau. Sementara itu, negara-negara Asia dengan pendapatan tinggi direkomendasikan untuk memberikan dukungan keuangan, pajak bagi UKM serta mengembangkan proyek ramah lingkungan (Yunfeng et al., 2023).

Menurut pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, *green economy* yaitu model pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam, dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dilakukan melalui proses produksi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang lebih baik, serta promosi inklusi sosial.

2.2.7. Pariwisata

Salah satu dimensi pembangunan nasional adalah pembangunan pariwisata. Hingga saat ini, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah. UNWTO mencatat bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi paling kuat dan tercepat di dunia serta memiliki peran yang masif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan pada saat yang sama, pariwisata harus dikelola secara optimal untuk memperluas manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan alam, dan budaya.

Istilah "pariwisata" dalam bahasa Sansekerta berasal dari kata "wis", yang dapat diartikan sebagai tempat tinggal, perkampungan, komunitas, dan "ata", diartikan pergi mengembara secara terus menerus (Suwanto, 2004), (Suwena & Widyatmaja, 2017) mendefinisikan pariwisata yaitu kegiatan orang bepergian menuju tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya dan bersifat sementara. Kepergiannya dikarenakan berbagai motif kepentingan, baik ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial politik, maupun kepentingan lainnya.

Pengertian pariwisata juga disampaikan Mathieson and Wall (2006), (Sunaryo, 2013) yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu ke tempat tujuan wisata, berkegiatan di objek wisata dengan fasilitas yang mendukung untuk berwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai segala kegiatan/aktivitas perjalanan seseorang maupun kelompok di luar tempat tinggalnya dalam waktu terbatas dengan tujuan di luar kepentingan tertentu (Ridwan M, 2020). Dengan demikian, pariwisata menurut beberapa pendapat sebelumnya dapat diartikan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu lokasi di luar wilayah rumah tinggalnya bukan mendapatkan penghasilan namun aktivitas untuk memperoleh kesenangan.

2.2.8. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan selama beberapa waktu ini telah menjadi isu yang menuai perhatian dalam perencanaan destinasi, kebijakan regional, dan nasional. Perhatian ini menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam memandang keberlanjutan dalam industri pariwisata. *World Tourism Organization* (WTO) meminta negara-negara anggotanya untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Beberapa konsep pariwisata berkelanjutan, seperti pariwisata berbasis komunitas (CBT) dan pariwisata alam, bertujuan untuk meningkatkan upaya keberlanjutan. Konsep-konsep ini harus disosialisasikan di sejumlah negara secara kontinu.

Definisi pariwisata berkelanjutan dikemukakan antara lain oleh *The World Tourism Organization* (UNWTO), yaitu kegiatan pariwisata yang berdampak menyeluruh pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memperhitungkan kondisi saat ini maupun masa datang. Tujuan wisata adalah memenuhi keperluan wisatawan, perkembangan industri, memperhatikan lingkungan dan mendukung potensi masyarakat lokal (Rahayu & Megasari, 2018). Konsep keberlanjutan wisata adalah rumusan rencana kegiatan wisata yang disusun dengan kehati-hatian, memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan berjangka panjang. Pengelolaan wisatanya harus dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, disertai dengan adanya penghormatan terhadap nilai sosial, ekologi, dan budaya. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian pada saat kegiatan tersebut berlangsung (Bušljeta Tonković, 2019). Pariwisata berkelanjutan menurut (Leković et al., 2020) tidak hanya sebatas ada kegiatan, namun harus mampu menjaga tingkat kepuasan wisatawan dan perlu adanya inovasi dalam pengembangannya (Roman et al., 2020), (Joo et al., 2020), (Anand et al., 2012). Prinsip utama pariwisata berkelanjutan mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan warisan budaya, dan dukungan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal. Secara lebih rinci, tiga pilar utama pariwisata berkelanjutan

meliputi:

1. Lingkungan, menekankan pentingnya pengurangan jejak ekologis pariwisata dengan cara meminimalkan polusi, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengelola sumber daya alam secara efisien. Misalnya, penerapan pengelolaan polusi, limbah wisata, sampah, dan pemanfaatan energi terbarukan (Kusumah Galih, 2024).
2. Sosial dan Budaya, melestarikan tradisi dan kebudayaan lokal, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat memengaruhi integritas sosial budaya masyarakat lokal (Sahara & Susanto, 2023).
3. Ekonomi, memastikan bahwa kegiatan pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang merata dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja dan pemberian dukungan bagi usaha kecil lokal (Elsa, 2017).

Pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pariwisata yang mengutamakan pelestarian destinasi wisata dengan menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan. Ciri-ciri utama dari pariwisata berkelanjutan meliputi : (a) Memberikan manfaat pembangunan ekonomi lokal; (b) Menjamin bahwa pertumbuhan pariwisata membawa efek positif bagi masyarakat serta lingkungan; (c) Memenuhi profitabilitas dan kelayakan; (d) Menjadi bagian dari kebudayaan lokal; dan e) Melakukan investasi kembali ke dalam wilayah atau komunitas setempat (CVO, 2022) (Purnaweni et al., 2019).

Selanjutnya (Shu-Yuan et al., 2018) menjelaskan enam elemen kunci pariwisata berkelanjutan, antara lain:

1. Energi hijau : penggunaan energi terbarukan seperti, tenaga matahari, angin, serta biomassa guna mengurangi emisi karbon dari aktivitas pariwisata. Penerapannya mencakup penggunaan teknologi hemat energi di hotel, restoran, serta fasilitas

wisata lainnya.

2. Transportasi hijau: mengutamakan pemakaian sepeda, kendaraan non BBM, maupun angkutan umum yang efisien. Tujuannya menurunkan produksi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas transportasi dalam sektor pariwisata.
3. Bangunan hijau: pembangunan dan renovasi bangunan dengan prinsip ramah lingkungan, di antaranya melalui penggunaan material bangunan berkelanjutan, desain yang hemat energi, dan pengelolaan limbah yang efektif.
4. Infrastruktur hijau: pengembangan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan, seperti sistem pengelolaan air yang efisien, pengolahan limbah yang ramah lingkungan, serta ruang terbuka hijau untuk menjaga keanekaragaman hayati.
5. Pertanian hijau: mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan bahan pangan lokal untuk sektor pariwisata. Hal ini meliputi penggunaan teknik pertanian organik dan pengurangan penggunaan pestisida berbahan kimia.
6. Teknologi pintar: penerapan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pariwisata, seperti sistem manajemen energi otomatis, aplikasi pemantau jejak karbon wisatawan, serta solusi digital untuk mengurangi penggunaan kertas.

Selanjutnya tujuan pariwisata berkelanjutan dikemukakan oleh (Asy'ari et al., 2021; Prasetyo & Nararais, 2023; Uluum & Nugroho, 2023) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pelestarian dan perlindungan lingkungan alam.

Pelestarian dan perlindungan lingkungan alam merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati, potensi alam, serta memastikan kestabilan ekologi bagi generasi yang akan datang. Upaya ini dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan mengurangi degradasi lingkungan, sehingga ekosistem dapat terus berfungsi efektif. Sehingga

implementasi langkah-langkah konservasi berbasis ilmiah sangat bermanfaat bagi generasi mendatang untuk mempergunakan potensi alam dan menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan produktif (Uluum & Nugroho, 2023).

2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal.

Pemberian manfaat secara sosial dan kesejahteraan yang berdampak kepada penduduk setempat guna menjamin pengelolaan potensi alam serta proses pembangunan berlangsung dengan penuh tanggung jawab dan mendukung kesejahteraan dalam jangka panjang. Upaya tersebut mencakup pengembangan model ekonomi inklusif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial serta menjaga keseimbangan ekosistem guna mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan (Asy'ari et al., 2021).

3. Edukasi dan Kesadaran.

Peningkatan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya konservasi alam dan pelestarian budaya lokal bertujuan untuk membangun kesadaran untuk memelihara kelestarian lingkungan dan warisan budaya. Langkah ini bertujuan untuk mengedukasi wisatawan agar terlibat secara aktif dalam praktik-praktik pariwisata yang bertanggung jawab, serta meminimalkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan serta komunitas setempat. Dengan cara ini wisatawan dapat turut serta dalam usaha pelestarian warisan budaya dan potensi alamiah sdecara terus menerus (Prasetyo & Nararais, 2023).

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan selain dikemukakan oleh para ahli di atas juga dirumuskan *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC, 2019) sebagai berikut:

A. Tatakelola Berkelanjutan

A.1. Struktur dan Kerangka Kerja Pengelolaan

A.1.1. Tanggungjawab Destinasi

Destinasi memiliki organisasi, departemen, kelompok, atau komisi yang menangani pariwisata berkelanjutan di seluruh sektor swasta, publik, dan sipil. Kelompok-kelompok ini memiliki kemampuan untuk mengelola masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Mereka juga dapat mengawasi dan menerapkan pengelolaan tersebut. Kelompok itu didanai dengan cukup, bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengelola destinasi, dan memiliki pekerja yang memadai—termasuk karyawan yang berpengalaman dalam keberlanjutan dan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam beroperasi dan bertransaksi.

A.1.2. Rencana strategis dan aksi program pengelolaan destinasi

Penerapan rencana strategis dan tindak lanjut aksi pengelolaan destinasi untuk beberapa tahun, yang dapat diakses oleh publik. Strategi ini mencakup identifikasi dan analisis aset pariwisata serta masalah dan risiko sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan. Strategi ini terkait dengan dan memengaruhi kebijakan dan tindakan.

A.1.3. Monitoring dan pelaporan

Destinasi menerapkan sistem untuk memantau dan menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pariwisata. Secara teratur, tindakan dan hasilnya dipantau dan dievaluasi, dan laporan publik diberikan. Sistem pengawasan diperiksa secara berkala.

A.2. Pelibatan *Stakeholders*

A.2.1. Pelibatan industri pariwisata dan penentuan standar keberlanjutan

Destinasi secara teratur memberikan informasi kepada bisnis pariwisata tentang masalah keberlanjutan dan mendukung mereka dalam menerapkan praktik berkelanjutan. Destinasi mempromosikan penerapan standar keberlanjutan, termasuk

penerapan standar yang dikenali oleh GSTC-I dan, jika tersedia, skema sertifikasi terakreditasi GSTC-I untuk badan usaha pariwisata. Destinasi juga mempublikasikan daftar perusahaan keberlanjutan yang disertifikasi.

A.2.2. Pelibatan dan respon dari penduduk setempat

Destinasi memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Destinasi memiliki sistem untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat tentang peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan untuk membangun kapasitas mereka untuk menanggapi perubahan. Aspirasi, kekhawatiran, dan kepuasan masyarakat setempat dengan keberlanjutan pariwisata dan pengelolaan destinasi secara teratur dipantau dan dilaporkan secara terbuka serta mengambil langkah sebagai tanggapan atas tanggapan tersebut.

A.2.3. Pelibatan dan tanggapan dari pengunjung

Destinasi memiliki sistem untuk melacak dan melaporkan kepuasan pengunjung terhadap kualitas dan keberlanjutan pengalaman mereka dan, jika diperlukan, mengambil tindakan untuk menangani masalah tersebut. Pengunjung juga diberi informasi tentang masalah keberlanjutan di destinasi dan peran yang dapat mereka mainkan untuk menyelesaikannya.

A.2.4. Promosi dan Informasi

Destinasi menyediakan bahan promosi dan informasi yang tepat tentang barang, jasa, dan klaim keberlanjutan untuk pengunjung. Nilai dan pendekatan destinasi terhadap keberlanjutan ditunjukkan dalam pesan pemasaran dan komunikasi lainnya. Mereka juga memperlakukan masyarakat lokal, aset alam, dan budaya dengan hormat.

A.3. Mengelola ancaman dan adaptasi perubahan

A.3.1. Mengelola jumlah wisatawan dan kegiatan pengunjung

Destinasi memiliki sistem untuk mengelola pengunjung yang secara teratur ditinjau. Melacak dan mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung serta menurunkan atau meningkatkannya sesuai kebutuhan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, masyarakat, warisan budaya, dan lingkungan setempat.

A.3.2. Perumusan regulasi serta pengawasan pembangunan

Tempat wisata mempunyai peraturan, pedoman keputusan yang mengatur destinasi serta fitur pembangunannya. Pengaruh di ketiga sektor ekonomi hijau dipertimbangkan, penggunaan lahan berkelanjutan diintegrasikan pada rekonstruksi rancang bangun. Regulasi diperuntukkan bagi bisnis, misalnya peminjaman lahan dan ruang destinasi. Penyusunan regulasi dan keputusan melibatkan peran aktif masyarakat dan disebarluaskan.

A.3.3. Penyesuaian perubahan alam

Destinasi menentukan risiko dan peluang perubahan iklim dan menerapkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim saat membangun, merancang, mengembangkan, dan mengelola fasilitas pariwisata. Penduduk, industri, dan pengunjung menerima informasi tentang prediksi perubahan iklim, risiko, dan keadaan masa depan.

A.3.4. Pengaturan dampak dan krisis

Destinasi memiliki strategi untuk mengurangi risiko, mengelola krisis, dan tanggap darurat. Fokus utamanya disampaikan kepada penduduk, pengunjung, dan organisasi bisnis. Metode dan sumber daya yang digunakan untuk menerapkan rencana tersebut tersedia dan secara teratur diperbarui.

B. Sosial Ekonomi Berkelanjutan

B.1. Kebermanfaatan pada ekonomi masyarakat

B.1.1. Menilai kontribusi pendapatan

Baik kontribusi langsung maupun tak langsung pariwisata terhadap ekonomi

destinasi dipantau dan dilaporkan kepada publik. Tingkat jumlah pengunjung, pengeluaran pengunjung, lapangan kerja dan investasi, dan bukti distribusi keuntungan ekonomi adalah ukuran yang sesuai.

B.1.2. Peluang kerja dan karir

Tempat wisata mendukung peluang karier dan pelatihan di bidang pariwisata. Perusahaan yang beroperasi di sana berkomitmen untuk memberikan warga setempat kesempatan yang sama untuk bekerja, pelatihan dan peningkatan, lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan kesejahteraan yang adil.

B.1.3. Mendukung tumbuhnya pelaku usaha dan perekonomian yang berkeadilan

Bisnis lokal, rantai pasokan, mendukung investasi berkelanjutan, dan pariwisata yang meningkatkan ekonomi lokal. Prinsip perdagangan berkeadilan yang mencerminkan budaya setempat diterapkan untuk mendorong pengembangan dan pembelian produk lokal yang berkelanjutan.

B.2. Peningkatan ekonomi dan aspek sosial yang berdampak

B.2.1. Dorongan positif bagi masyarakat

Destinasi memiliki sistem yang memungkinkan dan mendorong perusahaan, pengunjung, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan dan masyarakat.

B.2.2. Pencegahan terjadinya diskriminasi dan perdagangan manusia

Destinasi memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara global. Ia memiliki praktik, undang-undang, dan kode perilaku yang mapan untuk mencegah dan melaporkan perdagangan manusia, perbudakan modern, eksploitasi komersial, pelecehan seksual terhadap anak-anak, remaja, perempuan, LGBT, dan kelompok minoritas lainnya. Undang-undang dan praktik yang sudah mapan telah diterbitkan dan dilaksanakan.

B.2.3. Kepatuhan terhadap hak kepemilikan dan hak akses pengguna

Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak kepemilikan dicatat dan dipatuhi. Mereka memastikan konsultasi publik, melindungi hak-hak komunitas asli, dan mencegah pemindahan tempat tinggal tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan tanpa kompensasi yang adil. Undang-undang dan peraturan juga melindungi hak pengguna dan akses ke sumber daya penting.

B.2.4. Sistem keamanan dan keselamatan

Sistem keamanan di lokasi wisata digunakan untuk melacak, mencegah, dan melaporkan bahaya kejahatan, melindungi keamanan dan kesehatan bagi pengunjung dan penduduk setempat.

B.2.5. Ketersediaan akses untuk semua

Situs, fasilitas, dan layanan yang memiliki nilai budaya penting harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang yang memiliki keterbatasan fisik, dan orang yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Jika situs dan fasilitas tidak dapat diakses secara langsung, solusi dirancang dan dilaksanakan dengan mempertahankan integritas situs dan mendukung orang yang memiliki keterbatasan fisik. Akses informasi tentang lokasi, layanan, dan fasilitas diberikan tanpa memandang batasan.

C. Keberlangsungan Budaya

C.1. Menjaga warisan budaya

C.1.1. Menjaga aset budaya

Destinasi menilai, merehabilitasi, dan mengonservasi budaya yang dimiliki seperti bangunan bersejarah dan hamparan alam.

C.1.2. Artefak budaya

Sebuah destinasi memiliki undang-undang yang mengatur penjualan, perdagangan,

pameran, dan pemberian artefak arkeologi dan sejarah. Undang-undang ini ditetapkan dan diketahui oleh semua orang, termasuk perusahaan pariwisata dan pengunjung.

C.1.3. Warisan tak-benda

Destinasi mendukung penghargaan dan pelestarian warisan budaya tak-benda, termasuk adat istiadat, seni, bahasa, musik, dan makanan lokal, serta elemen lain yang membentuk identitas dan kekhasan setempat. Penyajian, peniruan, dan interpretasi budaya dan tradisi yang masih ada dilakukan secara hati-hati dan penuh penghargaan terhadap warisan leluhur. Partisipasi aktif masyarakat setempat dalam menghormati warisan budaya memberikan pengalaman yang nyata bagi pengunjung.

C.1.4. Akses tradisional

Destinasi mengawasi akses masyarakat, melindungi, dan memelihara situs-situs budaya dan kelestarian alam.

C.1.5. Hak Cipta

Destinasi memiliki tata cara yang melindungi hak kekayaan intelektual setiap orang dan masyarakat.

C.2. Mengunjungi situs budaya

C.2.1. Panduan wisata bagi pengunjung pada situs budaya

Panduan perilaku di situs budaya disediakan untuk pengunjung, operator perjalanan, dan pemandu wisata sebelum dan selama kunjungan dengan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan kepekaan masing-masing situs.

C.2.2. Interpretasi situs

Pengunjung mendapatkan pemahaman yang akurat tentang pentingnya elemen budaya dan alam di situs yang mereka kunjungi. Informasi ini disesuaikan dengan

budaya setempat, dikembangkan bersama dengan masyarakat tuan rumah, dan dikomunikasikan dengan jelas menggunakan bahasa yang dikuasai oleh pengunjung dan penduduk setempat.

D. Lingkungan yang berkelanjutan

D.1. Konservasi alam

D.1.1. Pelindungan dampak lingkungan

Destinasi memiliki sistem untuk memantau, mengukur, dan menanggapi dampak pariwisata terhadap lingkungan alami. Sistem ini termasuk konservasi ekosistem, habitat, dan spesies serta pencegahan penyebaran spesies asing yang berbahaya.

D.1.2. Pengaturan pengunjung pada situs alam

Destinasi mengatur kunjungan di dalam dan di sekitar situs alam dengan mempertimbangkan karakteristik, kemampuan, dan sensitivitas alam. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan pergerakan pengunjung.

D.1.3. Berinteraksi dengan kehidupan liar

Destinasi memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar lokal, nasional, dan internasional untuk berinteraksi dengan kehidupan liar. Interaksi dengan kehidupan liar yang bergerak bebas memperhitungkan dampaknya untuk menghindari dampak buruk terhadap satwa, dan perilaku populasi di alam liar.

D.1.4. Kesejahteraan dan pencegahan perdagangan satwa

Destinasi memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar lokal, nasional, dan internasional yang menjamin kesejahteraan satwa dan konservasi spesies. Pemanenan atau penangkapan, perdagangan, pameran, dan penjualan spesies hidupan liar dan produk terkait juga termasuk dalam kategori ini.

Tidak boleh ada satwa liar yang ditangkap, disilangkan, atau ditangkar kecuali oleh individu yang memiliki otoritas, dengan perlengkapan, dan untuk tujuan yang direncanakan dengan cermat. Penangkaran, pemeliharaan, dan penanganan hewan liar memenuhi standar kesejahteraan satwa yang paling tinggi.

D.2. Pengelolaan sumberdaya

D.2.1. Konservasi energi

Destinasi memiliki tujuan untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Destinasi memiliki sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, melacak, mengurangi, dan secara terbuka melaporkan kontribusi mereka terhadap tujuan ini.

D.2.2. Penatalayanan air

Bisnis di destinasi didorong untuk mengukur, memonitor, melaporkan secara terbuka, dan mengelola pemakaian air. Risiko air dikaji dan dicatat. Jika ada risiko air tinggi, penatalayanan air bertujuan untuk mengidentifikasi dan secara aktif bekerja sama dengan badan usaha untuk memastikan penggunaan air untuk pariwisata tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem setempat.

D.2.3. Kualitas air

Destinasi menggunakan standar baku untuk memantau kualitas air untuk tujuan minum, rekreasi, dan ekologi. Hasil pemantauan tersedia untuk umum, dan destinasi memiliki sistem untuk mengatasi masalah kualitas air dengan cepat.

D.3. Pengaturan limbah dan emisi

D.3.1. Limbah air

Destinasi memiliki petunjuk yang jelas dan konsisten tentang cara meletakkan, menjaga, dan menguji buangan dari sistem tangki kakus dan pengolahan air limbah.

Ini memastikan bahwa limbah ditangani dengan baik dan dipakai ulang atau dibuang dengan aman tanpa berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan setempat.

D.3.2. Limbah padat

Jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan wisata dikelola dengan baik Destinasi mendorong untuk menghindari, mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang limbah padat. Limbah makanan adalah salah satunya. Ada upaya untuk mengurangi barang sekali pakai, terutama plastik. Setiap limbah padat yang tidak dapat dipakai ulang atau didaur ulang dibuang secara aman.

D.3.3. Mitigasi perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca

Destinasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah dampak perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan dalam semua aspek operasional. Mereka harus mengukur, mengawasi, mengurangi, atau minimal melaporkan secara terbuka dan menggalakkan kompensasi bagi penggunaan fasilitas ramah lingkungan.

D.3.4. Transportasi hemat energi

Mengurangi emisi yang disebabkan oleh transportasi antara lokasi. Destinasi disarankan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata terhadap pencemaran udara, kemacetan, dan perubahan iklim dengan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor hemat energi dan kegiatan bersepeda atau jalan kaki.

D.3.5. Kebisingan dan Pencemaran cahaya

Destinasi memiliki panduan dan peraturan untuk mengurangi pencemaran cahaya dan kebisingan. Destinasi meminta perusahaan untuk mematuhi panduan dan peraturan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan standar yang dikeluarkan oleh GSTC, Kementerian Parekraf membuat kebijakan tentang Panduan Desa Wisata Berkelanjutan (Permenparekraf RI No 9 Tahun 2021) dengan rincian sebagai berikut :

A. Pengelolaan Berkelanjutan

Standar pengelolaan berkelanjutan terdiri dari tiga subbagian yang masing-masing memiliki sebelas komponen yang dijabarkan demikian:

1. Struktur dan kerangka pengelolaan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pengelolaan destinasi yang akuntabel

Pelaporan yang dapat digunakan untuk mendukung tanggung jawab pengelolaan tempat wisata antara lain menuat: 1) sistem manajemen yang efektif, terorganisir, dan melalui pengelolaan anggaran serta pembagian tugas secara jelas; dan 2) hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis dengan berlandaskan hukum yang telah eksis;

b) Arah strategi dan rencana program aksi pengelolaan destinasi.

Arah perencanaan program pariwisata tahunan (jangka pendek, menengah, dan panjang) dapat digunakan untuk menunjukkan indikator dan bukti yang mendukung rencana aksi dan strategi pengelolaan lokasi. Strategi ini mencakup peningkatan aksesibilitas, fasilitas kepariwisataan, dan kegiatan wisata di lingkup destinasi, melalui mempertimbangkan kapasitas destinasi dan sumber daya pendukung dalam berbagai aspek. Arah strategi ini memerlukan dukungan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan.

c) Monitoring dan pelaporan.

Hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata merupakan sejumlah topik dari sistem pemantauan dan evaluasi yang

dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. Sistem ini juga mencakup strategi untuk mengurangi dampak pariwisata dan meningkatkan transparansi dana.

2. Peran Serta Pemangku Kepentingan, meliputi empat jenis, yaitu:

a) Keterlibatan swasta dan regulasi standar keberlanjutan.

Sektor pariwisata diatur oleh standar yang mendukung keterlibatan berbagai sektor, termasuk swasta. Untuk memenuhi persyaratan pariwisata yang berkelanjutan dan konsisten, standar yang telah disertifikasi diberitahukan kepada masyarakat.

b) Peran serta dan respon balik penduduk setempat.

Salah satu dokumen yang menjelaskan adanya keterlibatan masyarakat yaitu tingkat kehadiran dalam proses perumusan dan pelaksanaan program destinasi berkelanjutan. Secara teratur, keberlanjutan pariwisata dan pengelolaan destinasi diperhatikan dan dikomunikasikan. Destinasi memiliki sistem yang membantu masyarakat lokal memahami peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan mereka.

c) Peran serta dan tanggapan balik pengunjung.

Indikator untuk mengetahui adanya keterlibatan pengunjung dapat dipantau dari laporan kepuasan pengunjung dengan melakukan pengumpulan data seperti melakukan wawancara dengan pengunjung, melakukan survei, atau kecepatan menangani keluhan.

d) Pemasaran dan penyampaian informasi.

Penyampaian informasi dan pemasaran destinasi, barang, dan fasilitas yang ditawarkan memenuhi kriteria sesuai kondisi yang sebenarnya,

bertanggung jawab, dan menghargai kearifan lokal.

3. Pengelolaan tekanan dan perubahan, meliputi 4 jenis, yaitu:

a) Pengelolaan data jumlah dan aktivitas pengunjung.

Adanya data hasil monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap jumlah dan jenis kegiatan pengunjung termasuk keputusan untuk menambah atau membatasi jumlah pengunjung sesuai kebutuhan.

b) Penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian dampak pembangunan.

Tersedia kebijakan berupa peraturan tentang perencanaan pembangunan yang disampaikan secara terbuka dan diawasi penerapannya. Kebijakan tersebut mengatur tentang penataan tata ruang dan pengendalian penggunaan lahan, desain perencanaan, pembuatan konstruksi, dan pembongkaran bangunan.

c) Penyesuaian Akibat Terjadinya Perubahan Musim.

Faktor pendukung untuk menilai adanya penyesuaian terhadap perubahan musim adalah peningkatan sistem, peraturan, program, kebijakan, dan kesadaran masyarakat untuk pengurangan risiko akibat kegiatan di destinasi wisata.

d) Tatakelola Risiko Dan Ancaman Krisis

Sistem pengelolaan tanggap darurat memberikan indikator dan bukti pendukung untuk menghadapi ancaman krisis dan risiko. Upaya ini memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun teknologi informasi.

B. Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan.

Terdapat 2 sub kriteria untuk mengukur keberlanjutan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Kebermanfaatan ekonomi lokal.

Meliputi 3 indikator, yaitu:

a) Kontribusi ekonomi pariwisata yang terukur.

Kontribusi ekonomi pariwisata terhadap ekonomi destinasi dapat diukur dengan indikator dan bukti yang dapat diandalkan. Ukuran kontribusi secara ekonomi adalah tingkat kunjungan, konsumsi pengunjung, ketersediaan lapangan kerja, investasi, dan manfaat ekonomi yang berdampak.

b) Kesempatan kerja dan karir.

Alat ukur untuk mengetahui tersedianya kesempatan kerja dan karier yaitu aturan dan informasi mengenai kebutuhan lapangan pekerjaan, kesempatan mengikuti pendidikan, jaminan keselamatan kerja, dan keadilan dalam mendapatkan gaji yang diterapkan secara inklusif tanpa diskriminasi.

c) Mendukung kemandirian dan bisnis lokal yang adil.

Penilaian tentang bentuk dukungan kemandirian bisnis lokal yang menerapkan prinsip keadilan dapat dilihat dari jenis usaha seperti makanan, minuman, kerajinan, seni pertunjukan, dan produk pertanian yang dijalankan oleh UMKM. Kegiatan usaha ini memungkinkan UMKM untuk mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip perdagangan yang adil.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berdampak.

Peningkatan tersebut memuat 5 ketentuan, yaitu:

a) Pendampingan usaha masyarakat.

Terlaksananya program kegiatan peningkatan kapasitas dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada inisiatif keberlanjutan dan masyarakat.

b) Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi

Adanya aturan di berbagai tingkatan untuk mencegah perdagangan orang, eksploitasi, terjadinya tindak diskriminasi, dan kekerasan seksual pada siapa pun, baik dari jenis kelamin maupun usia.

c) Hak kepemilikan dan pengguna

Hak kepemilikan dan akuisisi diatur dan dicatat dalam undang-undang. Pemangku kepentingan menjamin konsultasi publik yang terbuka. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal secara adil tanpa paksaan. Peraturan juga memuat perlindungan terhadap penggunaan akses sumber daya sebagai hak masyarakat.

d) Keselamatan dan keamanan

Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dan penduduk setempat, terdapat alat yang bekerja sebagai pelacak, pencegahan, pelaporan dan merespon bahaya kriminal dan menjamin kesehatan.

e) Akses untuk semua

Akses masyarakat lokal terhadap situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, keagamaan, dan spiritual di destinasi pariwisata harus tetap terjamin melalui program yang disediakan. Apabila memungkinkan, seluruh situs, fasilitas, dan layanan yang memiliki nilai penting bagi alam maupun budaya perlu dibuka untuk semua kalangan, termasuk individu dengan keterbatasan fisik maupun kebutuhan khusus. Dalam kondisi ketika akses langsung tidak dapat diberikan, maka solusi alternatif harus dirancang

dan diterapkan dengan tetap menjaga integritas situs serta memastikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan akses khusus. Selain itu, informasi mengenai tingkat aksesibilitas lokasi, layanan, dan fasilitas wajib disediakan secara jelas.

C. Kestinambungan Budaya

Budaya berkelanjutan memiliki 2 sub bidang , yaitu:

1. Perlindungan warisan lokal, meliputi 5 indikator, yaitu:

a) Merawat modal budaya

Terdapat kebijakan serta mekanisme sistematis yang dirancang untuk melakukan evaluasi, rehabilitasi, dan pelestarian aset budaya, mencakup bangunan bersejarah maupun lanskap budaya.

b) Peninggalan budaya

Untuk mengendalikan aktivitas penjualan, perdagangan, pameran, serta distribusi artefak arkeologi dan sejarah, pemerintah menetapkan regulasi yang disosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk pelaku industri pariwisata maupun wisatawan.

c) Peninggalan non-benda

Perayaan sekaligus pelestarian warisan budaya takbenda lokal, yang mencakup adat istiadat, seni, musik, bahasa, kuliner, serta unsur lain yang membentuk identitas dan kekhasan masyarakat, dilaksanakan secara terstruktur. Proses penyebaran, peniruan, dan interpretasi tradisi yang masih hidup dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan, melalui keterlibatan aktif serta pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga mampu menghadirkan pengalaman autentik bagi para pengunjung.

d) Jalan ke situs budaya

Akses masyarakat lokal terhadap situs alam maupun budaya diawasi secara ketat, dijamin perlindungannya, dan apabila diperlukan dilakukan upaya pemulihan.

e) Hak kekayaan intelektual

Ada sistem yang berkontribusi pada perlindungan hak kekayaan intelektual individu dan masyarakat.

2. Bewisata di peninggalan budaya, meliputi dua indikator, yaitu:

a) Pengaturan wisatan mendatangi tempat bersejarah

Pedoman mengenai perilaku pengunjung pada situs budaya maupun peristiwa budaya yang bersifat sensitif disediakan bagi wisatawan, operator perjalanan, serta pemandu wisata sebelum dan selama kunjungan berlangsung. Sistem pengelolaan pengunjung di dalam maupun sekitar situs budaya dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, serta tingkat sensitivitas situs, dengan tujuan mengoptimalkan arus kunjungan sekaligus meminimalkan dampak negatif.

b) Interpretasi Situs

Pengunjung menerima bahan interpretasi yang akurat yang menjelaskan pentingnya elemen budaya dan alam di situs yang dikunjungi. Informasi yang disampaikan diselaraskan dengan konteks budaya lokal, dikembangkan melalui kolaborasi bersama masyarakat tuan rumah, serta dikomunikasikan secara jelas menggunakan bahasa yang dipahami baik oleh pengunjung maupun penduduk setempat.

D. Kestinambungan Lingkungan

Kesinambungan lingkungan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Penjagaan lingkungan warisan alam, meliputi 4 indikator, yaitu:

Terdiri dari 4 kriteria, yaitu:

a) Pengawasan alam yang sensitif

Tersedia sistem yang dirancang untuk melacak, mengukur, serta merespons dampak aktivitas pariwisata terhadap lingkungan alami, dengan tujuan melindungi ekosistem, habitat, dan keanekaragaman spesies, sekaligus mencegah masuknya serta penyebaran spesies asing yang berbahaya.

b) Pengaturan pengunjung pada destinasi lingkungan

Sistem pengelolaan pengunjung, baik di dalam maupun di sekitar kawasan alam, dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, serta tingkat sensitivitas lingkungan tersebut, sehingga mampu mengoptimalkan pergerakan wisatawan sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Sebelum dan selama kunjungan, pengunjung, operator perjalanan, dan pemandu dapat menemukan pedoman tentang bagaimana berperilaku saat berada di lokasi yang sensitif.

c) Interaksi dengan satwa liar

Interaksi dengan satwa liar yang hidup bebas diatur melalui suatu sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lokal, nasional, maupun internasional terkait praktik interaksi dengan fauna. Pengelolaan interaksi ini mempertimbangkan dampak kumulatif yang bersifat nirinvasif dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah timbulnya efek merugikan terhadap kelangsungan hidup, perilaku, serta viabilitas populasi satwa di alam.

d) Konservasi binatang

Sistem telah tersedia untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta standar lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada kesejahteraan dan konservasi spesies satwa. Selain itu, terdapat mekanisme yang mengatur praktik pemanenan, penangkapan, perdagangan, pameran, dan penjualan satwa liar beserta produk turunannya. Tidak diperkenankan adanya penangkapan, persilangan, maupun penangkaran satwa liar kecuali dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan perlengkapan yang sesuai, serta untuk tujuan yang direncanakan secara cermat. Seluruh kegiatan penangkaran, pemeliharaan, dan penanganan satwa liar wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan yang tertinggi.

2. Pengaturan sumberdaya, meliputi 3 indikator, yaitu:

a) Energi terbarukan

Ada tujuan guna menaikkan penggunaan energi terbarukan, melakukan efisiensi penggunaan, dan mengurangi konsumsi energi. Destinasi memiliki sistem yang mendorong perusahaan guna mengawasi, mengukur, mengurangi, serta melaporkan secara transparan kontribusi mereka terhadap tujuan.

b) Penatalayanan air

Ada guna mendorong badan usaha untuk mengukur, mengawasi, dan melaporkan pemakaian air secara terbuka. Di tempat wisata, risiko air dikaji dan dicatat. Jika ada risiko tinggi, penatalayanan air berusaha untuk mengidentifikasi dan secara aktif mengupayakan badan usaha untuk memastikan bahwa penggunaan pariwisata tidak mengganggu

masyarakat dan ekosistem setempat.

c) Kualitas air

Terdapat sistem yang berfungsi untuk memantau kualitas air sesuai standar baku, mencakup kebutuhan konsumsi, rekreasi, maupun kepentingan ekologi. Hasil pemantauan tersebut tersedia bagi publik, sementara destinasi memiliki mekanisme yang mampu segera menangani permasalahan terkait kualitas air.

3. Pengaturan limbah serta emisi, memuat 5 indikator, yaitu:

a) Air limbah

Terdapat pedoman yang jelas dan dapat diandalkan mengenai tata cara pemasangan, pemeliharaan, serta pengujian sistem buangan dari septic tank dan instalasi pengolahan air limbah di lokasi ini. Pengelolaan limbah dilakukan secara tepat, dengan pemanfaatan kembali atau pembuangan yang aman, sehingga tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan.

b) Limbah padat

Terdapat metode yang digunakan untuk mengukur serta melaporkan timbulan limbah, sekaligus menetapkan target pengurangannya. Destinasi wisata mendorong perusahaan agar menghindari, mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang limbah padat, termasuk limbah makanan. Pengelolaan limbah padat dilakukan secara tepat, dengan sistem daur ulang yang efisien yang membedakan limbah berdasarkan jenisnya, serta memastikan pengangkutan dari lokasi pembuangan sementara maupun akhir. Setiap limbah padat yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang dibuang secara aman dan

berkelanjutan, dengan tujuan utama menekan penggunaan barang sekali pakai, khususnya plastik.

c) Dampak gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim

Destinasi menetapkan tujuan untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, melaksanakan kebijakan yang relevan, serta melaporkan secara transparan tindakan yang ditempuh guna mencapai target tersebut. Setiap perusahaan diwajibkan menjadikan pengurangan dampak gas rumah kaca sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk rantai pasok dan penyedia jasa. Tanggung jawab mereka mencakup pengukuran, pengawasan, pengurangan, serta pelaporan produksi gas rumah kaca secara terbuka, dengan komitmen untuk menekan emisi secara berkelanjutan.

d) Transportasi berdampak rendah

Targetnya adalah guna meminimumkan emisi dari transportasi perjalanan. Disarankan untuk mendorong penggunaan kendaraan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

e) Pencemaran cahaya dan kebisingan

Tempat wisata mendorong perusahaan guna mematuhi pedoman dan regulasi yang tersedia untuk mengurangi pencemaran cahaya dan kebisingan.

Untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan menuju *green economy*, terdapat sejumlah tata cara penting yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan sampah secara efektif, pemanfaatan dan daur ulang air, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. 2) Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan budaya lokal. 3) Pemberdayaan

komunitas dan budaya lokal guna meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dan menjaga warisan budaya. 4) Penguatan kerja sama dengan berbagai pihak internasional sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan (S. D. Kartika, 2024).

Definisi tersebut sejalan dengan kajian (Amerta et al., 2018) bahwa *green economy* yang mendukung pariwisata berkelanjutan pada bidang ekonomi, yaitu memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal; menyediakan peluang kerja yang stabil dan pendapatan bagi masyarakat lokal; serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui pariwisata. Dalam bidang lingkungan, artinya memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin tanpa melebihi kemampuan untuk meregenerasi sumber daya tersebut; melestarikan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; memelihara proses ekologi yang penting untuk mendukung keberlanjutan; dan mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Selanjutnya, dalam bidang sosial budaya adalah pentingnya penghormatan terhadap warisan masyarakat lokal, sekaligus memastikan bahwa aktivitas pariwisata memberikan manfaat nyata bagi komunitas setempat, seperti peningkatan kualitas hidup dan akses layanan sosial. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi aspek krusial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pariwisata. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan, sehingga pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pelestarian budaya.

Dengan demikian, indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada aturan di atas meliputi 3 bidang, yaitu: bidang ekonomi, adanya nilai tambah dari kegiatan ekonomi masyarakat, tersedianya peluang kerja, dan perekonomian yang berdampak sosial dalam jangka panjang. Pada bidang lingkungan, efisiensi sumber daya, penurunan

timbulan sampah, konservasi alam dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pada bidang sosial budaya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap warisan budaya setempat, peningkatan kualitas hidup dan layanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Serta pengelolaan desa ekowisata sebagai bagian di dalamnya.

2.2.9. Desa Wisata

Desa wisata dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu tren utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, sekaligus merepresentasikan arah baru dalam praktik berwisata. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pasar, di mana preferensi wisatawan yang sebelumnya berorientasi pada akomodasi berskala besar dan modern, kini bergeser menuju pilihan akomodasi maupun produk wisata yang lebih kecil, unik, dan berkarakter lokal.

Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan, desa wisata diharapkan mampu mendorong pemerataan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkesinambungan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dengan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan identitas lokal. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi alternatif destinasi, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan pariwisata yang berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

Dalam dua dekade terakhir, telah berkembang secara signifikan segmen pasar wisata minat khusus yang memberikan pengaruh nyata terhadap dinamika desa wisata. Wisatawan dengan beragam motivasi melakukan perjalanan ke desa wisata untuk merasakan kehidupan masyarakat setempat, berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas lokal, serta memperoleh pengalaman belajar mengenai kebudayaan tradisional. Atraksi yang ditawarkan desa wisata menjadi determinan penting dalam membentuk pola kunjungan

wisatawan. Faktor ini tidak hanya memengaruhi intensitas dan durasi kunjungan, tetapi juga memperkuat posisi desa wisata sebagai destinasi yang mampu mengintegrasikan aspek rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial budaya. Daldjoeni (1998) mengemukakan bahwa setiap desa memiliki kondisi geografis serta bentuk usaha masyarakat (*human effort*) yang berbeda satu sama lain. Variasi ini berimplikasi pada strategi komunitas sebagai *host community* dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, untuk kemudian dikemas menjadi atraksi wisata yang menarik bagi pengunjung. Preferensi wisatawan terhadap atraksi tertentu menuntut adanya pengembangan dan pengelolaan atraksi yang selaras dengan karakteristik serta potensi desa (Prakoso, 2015).

Definisi desa wisata yang disampaikan Muljadi (2009) adalah bentuk kegiatan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat beserta seluruh perangkat sosial, budaya, dan ekonomi yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian lingkungan alam serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Sebagai wilayah pedesaan yang memiliki keaslian sosial budaya, adat istiadat, pola kehidupan sehari-hari, arsitektur tradisional, serta struktur tata ruang khas, desa wisata menghadirkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Faktor-faktor pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung diintegrasikan secara sistematis untuk memperkuat promosi pariwisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Unsur utama yang ditawarkan oleh desa wisata terletak pada keunikan budaya, keindahan alam, serta berbagai aktivitas masyarakat yang mencerminkan keaslian desa tersebut. Kemampuan desa wisata dalam menghadirkan pengalaman yang otentik bagi wisatawan menjadi daya tarik tersendiri yang membedakannya dari bentuk pariwisata lainnya. Dengan kata lain, desa wisata dapat dipahami sebagai suatu bentuk integrasi antara

atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam kerangka kehidupan masyarakat lokal. Struktur ini menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif dan berorientasi pada pelestarian budaya serta lingkungan (Kemenparekraf, 2010). Pariwisata pedesaan, dikatakan Hadiwijoyo (2012), adalah suatu bentuk permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan. Melalui fasilitas tersebut, wisatawan memperoleh kesempatan untuk menikmati, mengenal, serta menghayati kekhasan desa beserta seluruh daya tarik yang dimilikinya, sekaligus berinteraksi dengan dinamika kehidupan masyarakat setempat. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan wisatawan memahami tata kehidupan masyarakat desa. Kehadiran fasilitas yang terintegrasi dengan lingkungan dan tradisi lokal (Ira & Muhamad, 2020).

Desa wisata dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan lokalitas serta kearifan masyarakat setempat, mencakup adat-istiadat, budaya, dan potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi tersebut kemudian dikelola secara sistematis sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kapasitas desa, dengan tujuan utama mendukung kepentingan sosial dan ekonomi komunitas lokal. Kearifan lokal, atau sistem pengetahuan lokal, merujuk pada pengetahuan khas yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Pengetahuan ini terbentuk melalui proses panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun, diwariskan lintas generasi, serta diperoleh melalui mekanisme pendidikan dan pengembangan yang berbasis pada pengalaman hidup masyarakat (Hermawan, 2016). Sejalan dengan pengertian di atas, (Widodo et al., 2020) menjelaskan bahwa desa wisata dapat dipahami sebagai kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus sehingga layak dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Masyarakat yang tinggal di desa wisata umumnya masih mempertahankan budaya dan tradisi asli, yang kemudian diperkaya

dengan berbagai faktor pendukung seperti kuliner khas, sistem pertanian tradisional, kondisi lingkungan yang alami, serta struktur sosial yang khas. Seluruh unsur tersebut berpadu membentuk identitas desa wisata yang unik dan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Desa wisata dapat dipahami sebagai bentuk integrasi pariwisata yang menggabungkan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara serta tradisi lokal. Model ini menampilkan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sehingga wisatawan memperoleh pengalaman yang autentik dan kontekstual. Selain itu, masyarakat desa wisata memiliki kesadaran kolektif untuk berperan aktif sesuai dengan keterampilan dan kapasitas masing-masing. Partisipasi tersebut menjadi landasan dalam pemberdayaan potensi lokal, yang kemudian dikemas secara kreatif agar mampu menarik minat wisatawan.

2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlanjutan *Green Economy* di Desa Wisata

Persyaratan suatu desa bisa menjadi desa wisata menurut Menparekraf (Wilda Fajriah, 2022), yaitu:

1. Keindahan Alam.

Setiap desa memiliki potensi alam yang khas, indah dan bernilai strategis bagi pengembangan pariwisata. Alam desa dapat diolah menjadi destinasi wisata secara berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Budaya.

Budaya merupakan salah satu determinan penting yang mampu meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Apabila masyarakat desa secara kolektif berperan aktif dalam memperkenalkan dan mempublikasikan kekayaan budaya yang dimiliki,

maka hal tersebut berpotensi besar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata.

3. Fasilitas kebersihan.

Fasilitas kebersihan menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas destinasi wisata. Keberadaan sarana kebersihan tidak hanya berfungsi menjaga kenyamanan wisatawan, tetapi juga mencerminkan komitmen masyarakat dan pengelola desa wisata.

4. *Homestay* yang terstandar.

Homestay yang tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) merupakan akomodasi berbasis rumah tinggal yang telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan sesuai pedoman Kemenparekraf.

5. Kreatifitas konten.

Dalam konteks era digital, terbuka peluang besar bagi desa wisata untuk memanfaatkan media daring sebagai sarana publikasi. Pembuatan konten kreatif melalui berbagai platform digital menjadi instrumen strategis untuk menarik perhatian wisatawan dan mendorong kunjungan ke destinasi tersebut.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pengembangan Desa Wisata menurut (Andy, 2020) terdiri dari 6 kriteria, di antaranya: masyarakat sebagai inisiator dan pemilik, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, berkontribusi terhadap kelestarian dan kualitas lingkungan dan budaya, menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan wisatawan, pertunjukan, fasilitas, dan profesionalitas pengelola, serta kepuasan pengunjung dan publik. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Sleman menyusun indikator untuk menilai tingkat kemandirian desa wisata dengan kriteria, yaitu: SDM, kelembagaan dan regulasi, pelestarian lingkungan, daya tarik wisata, amenities pendukung, kinerja desa

wisata, kemitraan, peran serta masyarakat, aksesibilitas, promosi dan pemasaran, mitigasi dan penanggulangan bencana.

Secara teoritis, analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini mengacu pada (Djuwendah et al., 2019) tentang faktor-faktor di ekowisata. Faktor pendukung yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut meliputi keindahan alam, keterbukaan masyarakat terhadap wisatawan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pelestarian seni, tradisi, dan budaya, keterlibatan *stakeholders*, kemajuan teknologi untuk promosi, potensi wisatawan, peluang investasi dari masyarakat, dan peluang pemanfaatan lahan. Sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi: keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya anggaran, infrastruktur jalan dan akomodasi yang belum cukup, kurangnya perencanaan tata ruang ekowisata, rendahnya keterampilan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dari instansi terkait, dan belum adanya rencana pengembangan ekowisata.

Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pendukung dan penghambat yang meliputi:

2.3.1. Faktor Pendukung

2.3.1.1. Keindahan Lingkungan Alam.

Keindahan, menurut KBBI, adalah kata dasar dari "indah", yang berarti cantik, elok, bagus dipandang. Indah bersifat universal, tidak terbatas pada waktu dan tempat, gaya, atau kedaerahan. The Liang Gie (1983) berpendapat bahwa definisi indah adalah sesuatu yang abstrak yang menggambarkan kekaguman dan bergantung pada cakupannya, baik konsep, filosofis, maupun kasat mata (Suyadi, 2016). Kondisi lingkungan pada destinasi pariwisata yang menampilkan daya tarik visual yang indah mampu menimbulkan rasa kagum sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi wisatawan. Keindahan lingkungan alam dipahami sebagai karakteristik destinasi yang mencerminkan lingkungan yang estetis

dan menarik, sehingga tidak hanya memberikan pengalaman positif bagi pengunjung, tetapi juga mendorong terjadinya kunjungan berulang serta memperluas jangkauan pemasaran destinasi kepada khalayak yang lebih luas (Hendriyati, 2020).

2.3.1.2. Keterbukaan Masyarakat.

Dalam mengelola desa wisata, masyarakat memainkan peran penting. Keterbukaan masyarakat terhadap investor atau pengunjung, dan kemampuan meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat (Herdiana, 2019).

2.3.1.3. Keterlibatan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata mencakup individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi satu sama lain dalam pengambilan kebijakan (Waligo et al., 2013). Mereka terdiri dari pemerintah, wisatawan, komunitas, bisnis pariwisata, media, dan akademisi (Kismartini & Pujiyono, 2020). Pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan sektor tersebut. Masyarakat lokal yakni penduduk asli yang tinggal di kawasan destinasi wisata berperan sebagai aktor utama. Peran mereka sangat signifikan karena keterlibatan langsung masyarakat tidak hanya menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah tersebut (Rais et al., 2023)

2.3.1.4. Kreativitas atraksi wisata.

Kreativitas dalam atraksi wisata adalah kemampuan mengolah keunikan, keindahan, dan nilai budaya/alam menjadi pengalaman yang menarik, bernilai tambah, dan berkelanjutan bagi wisatawan. Kreativitas bukan sekadar hiburan, tetapi strategi untuk memperkuat daya tarik destinasi (Helpiastuti, 2018).

2.3.2 Faktor Penghambat

2.3.2.1. Pengorganisasian lemah.

Pengorganisasian dapat dipahami sebagai proses pembentukan kelompok atas berbagai aktivitas yang telah dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, pengorganisasian mencakup penetapan sumber daya serta aktivitas yang diperlukan guna mewujudkan sasaran tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan dan pengembangan secara terstruktur (Nadiasari & Nurhadi, 2019).

Dalam kegiatan di desa wisata, masyarakat dikelola dan dilakukan pembagian tugas sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dan skala prioritas berdasarkan potensi yang dikelola. Pengorganisasian di desa wisata adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan berdasarkan struktur organisasi yang telah dibentuk. Dalam pengorganisasian terdapat pembagian pekerjaan yang direncanakan oleh pengurus desa wisata, penetapan hubungan pekerjaan yang harmonis di antara para pihak, dan penyediaan lingkungan dan fasilitas kerja yang kondusif..

2.3.2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) rendah.

Pengertian kompetensi dipahami sebagai seperangkat pengetahuan (kognitif), keterampilan (afektif), sikap, dan nilai (*behavior*) yang memungkinkan individu berperan efektif dalam konteks sosial maupun organisasi. Kompetensi tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kapasitas interpersonal, etika, dan adaptasi terhadap dinamika sosial (Ismla Sari et al., 2024). Selanjutnya (Lepar, B. S., & Sari, 2024) mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah seperangkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik individu yang memungkinkan seseorang melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan organisasi.

2.3.2.3. Keterbatasan Fasilitas Layanan.

Fasilitas layanan merupakan komponen krusial pada kepariwisataan. Fasilitas ini mencakup kebutuhan dasar wisatawan, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, dan fasilitas hiburan. Fasilitas layanan adalah elemen yang berkontribusi pada kepuasan wisatawan. Fasilitas harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung daya tarik utama desa wisata (Friskila Angela, 2023). Dalam konteks desa wisata, fasilitas layanan dapat berupa *homestay*, restoran lokal, transportasi tradisional, dan atraksi berbasis komunitas (Talib & Sunarti, 2020).

Selanjutnya (Pellokila & Sagala, 2019) menyatakan bahwa fasilitas layanan terdiri dari infrastruktur utama dan sekunder. Infrastruktur utama mencakup aksesibilitas seperti jalan, transportasi umum, dan sinyal telekomunikasi. Infrastruktur sekunder mencakup fasilitas tambahan seperti toko cenderamata, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. Di desa wisata, fasilitas ini harus disesuaikan dengan budaya lokal untuk memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan.

Pengetian fasilitas layanan juga dikemukakan (Jamalludin et al., 2024) yaitu sebagai bagian dari produk wisata yang meliputi elemen berwujud (fisik) dan tidak berwujud (pelayanan). Dalam desa wisata, ini bisa berupa fasilitas fisik seperti penginapan tradisional dan tidak berwujud seperti keramahan masyarakat lokal dalam melayani wisatawan.

Dengan demikian pengertian fasilitas layanan dimaksudkan sebagai kebutuhan wisatawan dalam bentuk infrastuktur fisik dan sekunder maupun fasilitas fisik. Wujud fasilitas dapat berupa jalan, transportasi, pusat informasi, tempat ibadah, toilet atau ruang ganti, *homestay*, toko cinderamata, dan fasilitas kesehatan. Selain itu keramahan dan atraksi lokal merupakan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan. Jika fasilitas ini belum terpenuhi, akan berpengaruh pada persepsi masyarakat dan tingkat kepuasan

pengunjung di desa wisata.

2.3.2.4. Keterbatasan anggaran.

Penganggaran dalam pengelolaan desa wisata merupakan komponen kunci yang krusial guna mendorong keberlanjutan. Sumber daya finansial berupa pendanaan/anggaran dibutuhkan sekali guna menyokong keberhasilan desa wisata. Dengan demikian, tidak berhenti pada peran dari pemerintah dan masyarakat namun juga diperlukannya peran dari sektor bisnis (Affiangit & Dewi, 2024). Ada berbagai sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh desa wisata, antara lain dari pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat setempat. Sumber pendanaan terdiri dari:

- a. Pendanaan dari pemerintah melalui Dana Desa, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta dapat berguna sebagai penunjang pengembangan desa wisata. Selanjutnya sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembangunan sektor tertentu, termasuk pariwisata, dan bantuan dari Kementerian.
- b. Pendanaan dari sektor swasta melalui kerja sama dengan pihak swasta. Bantuan diberikan melalui program tanggung gugat swasta. Kemitraan dengan investor: desa wisata dapat menjalin kemitraan dengan investor yang tertarik dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Investor biasanya terlibat dalam pembangunan fasilitas akomodasi, wisata kuliner, dan atraksi wisata lainnya.
- c. Pendanaan dari masyarakat (*Crowdfunding* & swadaya). Partisipasi masyarakat lokal dalam pendanaan desa wisata juga penting. Beberapa cara pendanaan dari masyarakat dapat berbentuk swadaya masyarakat: masyarakat dapat bergotong royong mengumpulkan dana, tenaga, dan sumber daya lainnya untuk membangun fasilitas wisata atau melakukan perbaikan infrastruktur. *Crowdfunding* platform bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana dari berbagai pihak, termasuk dari

wisatawan yang pernah mengunjungi desa tersebut atau dari individu yang tertarik membantu pengembangan desa wisata.

- d. Pendanaan dari hibah dan lembaga Non-Profit. Beberapa lembaga donor internasional dan lokal serta organisasi nonpemerintah (NGO) sering kali menyediakan hibah atau dana bantuan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Biasanya hibah ini diberikan pada proyek-proyek yang berdampak baik secara sosial dan lingkungan.

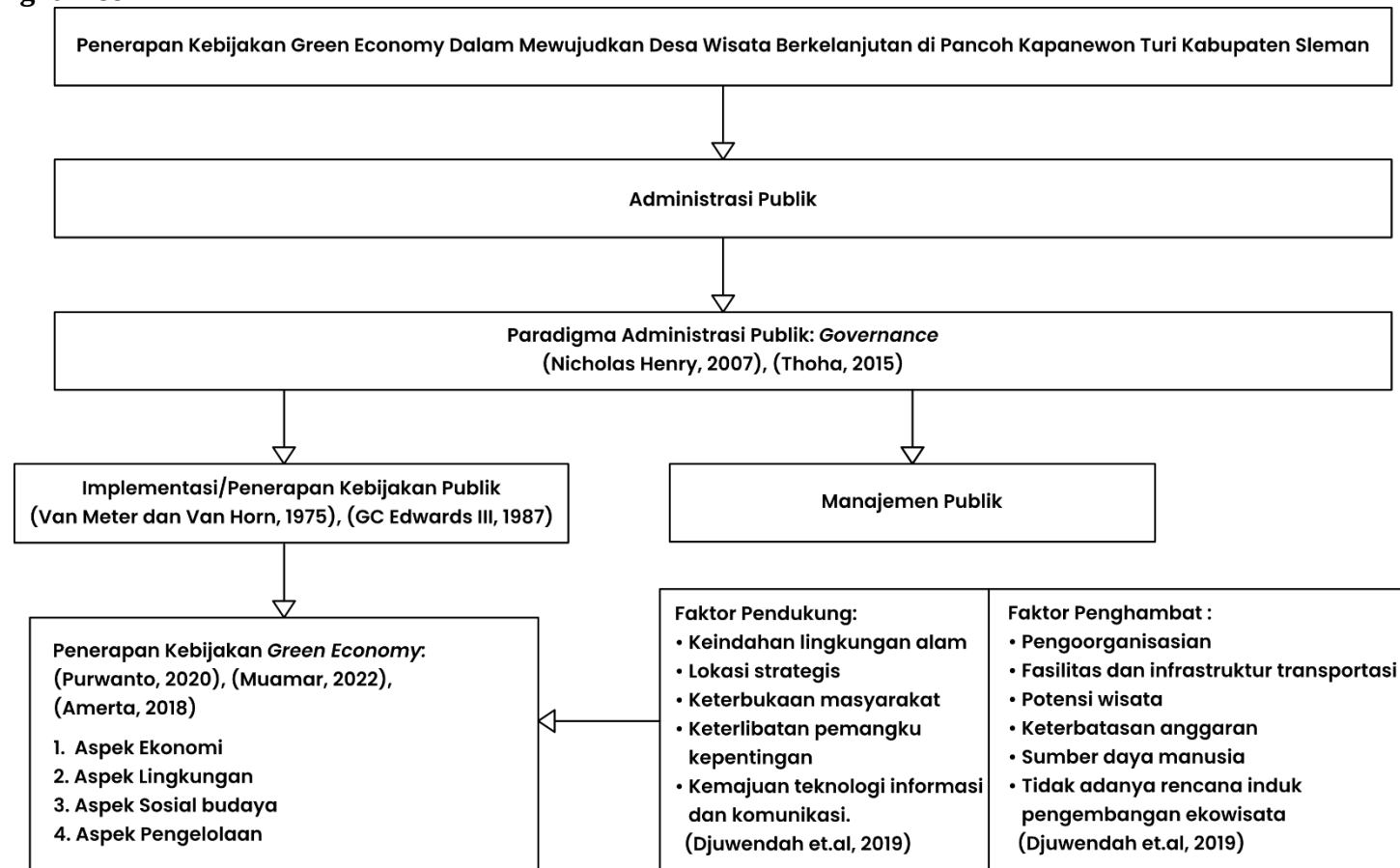
Pendanaan optimal serta terstruktur akan membantu desa wisata untuk berkembang lebih baik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta budaya setempat.

2.3.2.5. Tidak ada kebijakan pendukung pelaksanaan *green economy*.

Kebijakan *green economy* di sektor pariwisata adalah aturan, kebijakan, dan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi desa wisata dilakukan secara berkelanjutan, dengan menjaga keberlanjutan antara menjaga lingkungan, peningkatan ekonomi warga, serta pengalaman wisata yang berkualitas.

Menurut (Damanik et al., 2018) Kebijakan pendukung di desa wisata meliputi: peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi; peningkatan kerja sama kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi program pendampingan desa wisata berkelanjutan.

2.4. Kerangka Teori

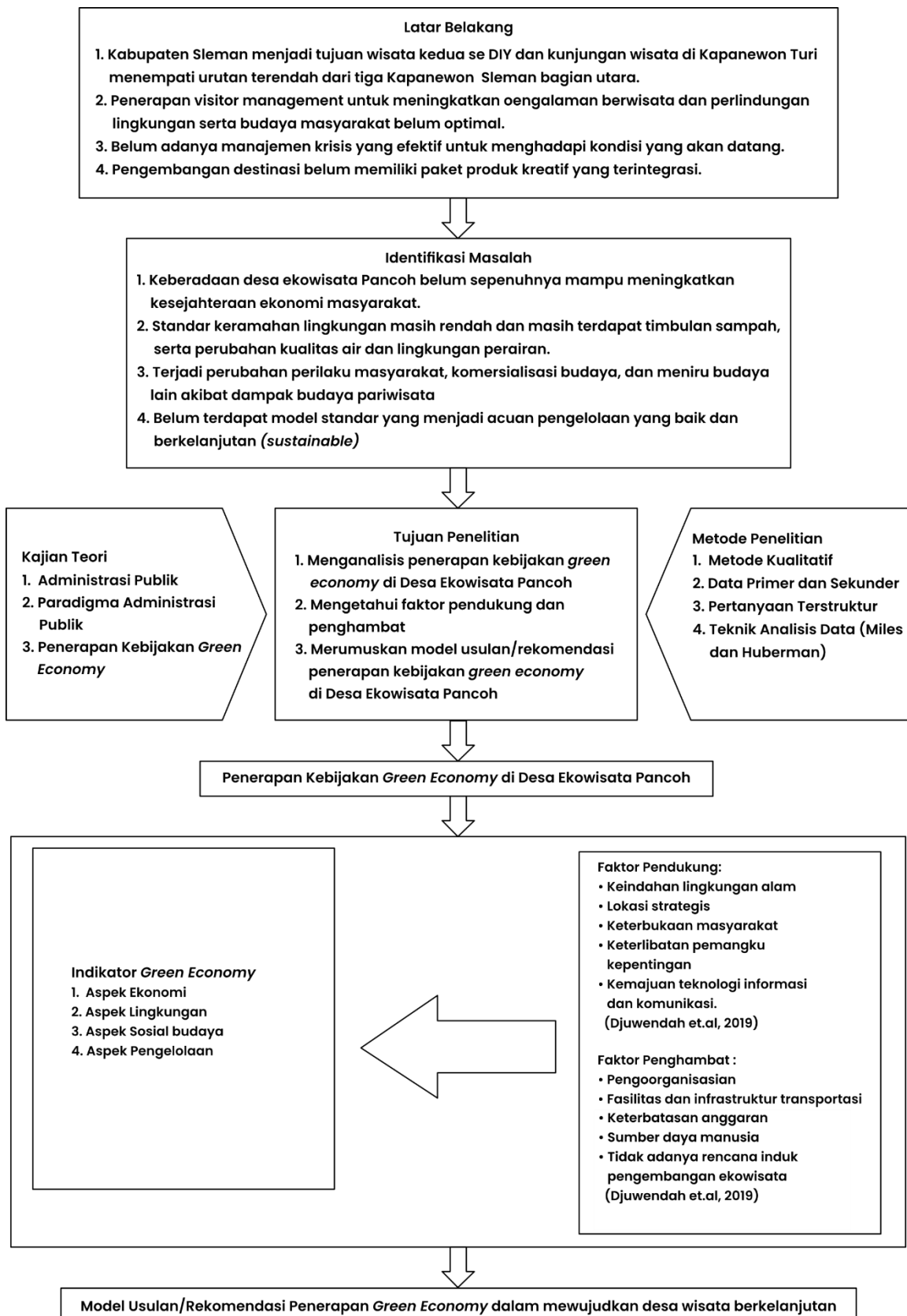


Gambar 2. 7
Kerangka Teori

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma *governance* dalam administrasi publik. Paradigma ini muncul dari adanya pergeseran peran pemerintah sebagai satu-satunya aktor menjadi pandangan yang lebih luas pada bagian ini, pemerintah, sektor bisnis, serta masyarakat sipil (*civil society*) berkolaborasi untuk mengatur dan memberikan layanan publik. Dalam menjalankan perannya, keterlibatan para pemangku kepentingan penting dalam kolaborasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum untuk mencapai tujuan bersama (Thoha, 2015).

Penelitian ini mengacu pada implementasi kebijakan dari konsep *green economy* yang dikemukakan Purwanto (2022), Amerta (2018), dan Permenparekraf RI No. 9 Tahun 2021, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan pengelolaan. Penelitian berkaitan dengan faktor-faktor menggunakan hasil kajian penelitian Djuwendah et al. (2019) sebagai konsep awal yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Faktor pendukung meliputi: keindahan lingkungan alam, lokasi strategis, keterbukaan masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan faktor penghambat meliputi: pengorganisasian, fasilitas dan infrastruktur transportasi, potensi wisata, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, tidak adanya rencana induk pengembangan ekowisata.

2.5. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. 8
Kerangka Pikir Penelitian